DINAS SOSIAL PPPA

Rancangan Akhir

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029

Jl. Supriadi No.07 Kabupaten Nganjuk
Telp. (0358) 3550772, Fax. (0358) 3550772
Email : dinosppppa@nganjukkab.go.id



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan Daerah;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, perlu adanya penjabaran secara operasional dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 – 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
11. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
15. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.
16. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu *output*/keluaran.
17. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
18. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.
19. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
21. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
22. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
23. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
24. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
25. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
26. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD yang memuat memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA, ISI BESERTA URAIAN

Pasal 3

(1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah, terdiri dari:
BAB I PENDAHULUAN;
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
BAB V PENUTUP.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis:
a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
i. Dinas Tenaga Kerja;
j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
k. Dinas Lingkungan Hidup;
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
s. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
t. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
u. Dinas Pertanian;
v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
w. Sekretariat Daerah;
x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
z. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
aa. Badan Pendapatan Daerah;
bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
cc. Inspektorat Daerah;
dd. Kecamatan Bagor;
ee. Kecamatan Baron;
ff. Kecamatan Berbek;
gg. Kecamatan Gondang;
hh. Kecamatan Jatikalen;
ii. Kecamatan Kertosono;
jj. Kecamatan Lengkong;
kk. Kecamatan Loceret;
ll. Kecamatan Nganjuk;
mm. Kecamatan Ngetos;
nn. Kecamatan Ngluyu;
oo. Kecamatan Ngronggot;
pp. Kecamatan Pace;
qq. Kecamatan Patianrowo;
rr. Kecamatan Prambon;
ss. Kecamatan Rejoso;

tt. Kecamatan Sawahan;
uu. Kecamatan Sukomoro;
vv. Kecamatan Tanjunganom;
ww. Kecamatan Wilangan; dan
xx. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Isi beserta uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan penyusunan rencana pembangunan Daerah; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, atau perubahan kebijakan nasional.
(3) Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun sebagaimana telah disusun pada Tahun 2025 dan berakhir pada Tahun 2029. Dokumen tersebut berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sebagai lembaga teknis Pelaksana Penyelenggara Pemerintah Daerah wajib merumuskan strategi pembangunan, kebijakan umum, program, kegiatan dan sub kegiatan yang mencakup gambaran sesuai dengan misi ke-4 Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu Meningkatkan Kualitas, Pelayanan, Mutu Pendidikan dan Kesehatan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dalam penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Penentuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) memperhatikan Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2030; Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024; Evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 2024 dalam pencapaian hasil *(outcome)*; Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; Kebijakan nasional; (regulasi yang berlaku; dan saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 meliputi: (1) Persiapan Penyusunan; (2) Penyusunan Rancangan; (3) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) Perumusan Rancangan Akhir; dan (5) Penetapan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk, dengan Menggunakan Pendekatan Teknokratik, Partisipatif, Politis, serta Atas-Bawah (Top-Down) dan Bawah-Atas (Bottom-Up) melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain. Keterkaitan dengan Perencanaan K/L dan Perencanaan Perangkat Daerah Provinsi, serta dengan Renja perangkat daerah. Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan

memperhatikan Perencanaan Kementerian/Lembaga, Perencanaan Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/ Kabupaten /Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk tahun 2024 – 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182)
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan;
21. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
29. Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak No 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor No 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarustamaan Gender;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

Jawa Timur Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2024 Nomor 4 seri D);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
35. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Daerah kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045.
38. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029
39. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun 2025-2029 setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik, yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

1.3.2 Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk;
c. Memberikan gambaran perencanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah;
d. Sebagai pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan;
e. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah;

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan;

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan (apabila ada);

2.1.6 Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ; dan

2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja , Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

4.2 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program prioritas Pembangunan Daerah;

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinnerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1 Gambaran Pelayanan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas dan fungsi:

a. Tugas Pokok

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. pelaksanaan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang

Kedudukan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

1. **Kepala Dinas**

   Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, menyelenggarakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta menyelenggarakan tugas di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. **Sekretariat**

   Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

   Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

   a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
   b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
   c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
   d. Pembinaan aparatur;
   e. Pengelolaan urusan kepegawaian;
   f. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
   g. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah;
   h. Pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
   i. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
   j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. Melaksanakan urusan persuratan;
b. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
c. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
d. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
e. Melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
f. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perlindungan, Jaminan, Rehabilitasi Sosial dan Kebencanaan

Bidang Perlindungan, Jaminan, Rehabilitasi Sosial dan Kebencanaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan rehabilitasi sosial serta jaminan sosial.

Bidang Perlindungan, Jaminan, Rehabilitasi Sosial dan Kebencanaan menyelenggarakan Fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial keluarga;
d. Pengembangan data pelayanan sosial orang dengan hiv/aids (odha) dan penyalahgunaan napza untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan kepahlawanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan menyelenggarakani Fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan sosial dan kepahlawanan;
b. Perumusan pedoman penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan kepahlawanan;
c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan kepahlawanan;
d. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan kepahlawanan;
e. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan kepahlawanan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, pengelolaan sistem informasi data gender dan anak.

Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;
b. Perumusan pedoman teknis program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;
c. Pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;
d. Pelaksanaan koordinasi, singkronisasi, fasilitasi kegiatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tugasnya.

6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pengarusutamaan hak anak.

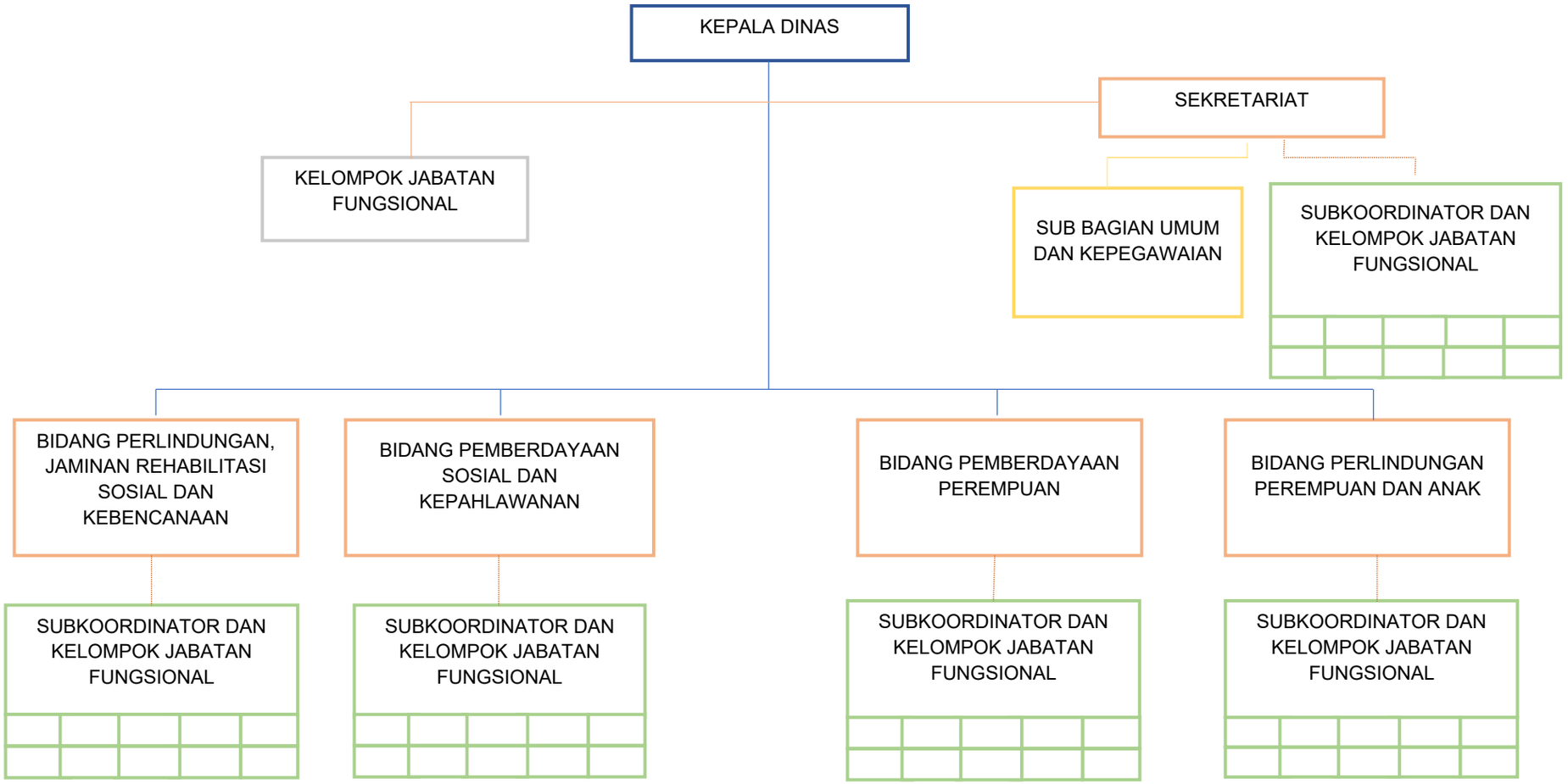
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan Fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pengarusutamaan hak anak;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pengarusutamaan hak anak;
c. Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pengarusutamaan hak anak;
d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan percepatan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PHA) sesuai amanat konvensi hak anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tugasnya.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK



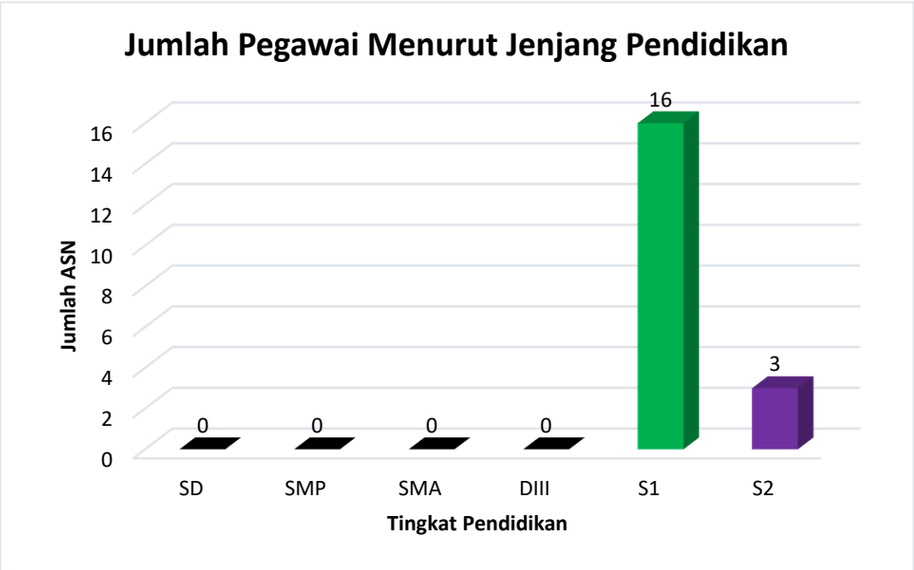
2.1.2 Sumber Daya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsi di dukung dengan sumber daya manusia berjumlah 19 (sembilan belas) ASN dengan uraian sebagai berikut:

- ASN Laki-Laki : 5 Orang
- ASN Perempuan : 14 Orang

Berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

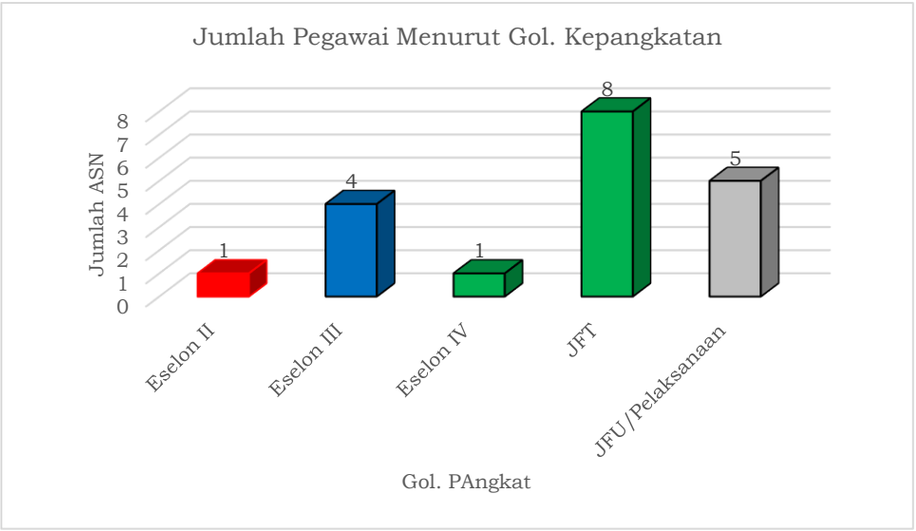
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Sosial PPPA Per Tahun 2024



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun 2024



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kemampuan sumber daya manusia Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk secara kuantitatif kurang memadai dengan beban kerja yang ada pada masing-masing bidang sehingga sering terjadi *overload* beban kerja yang akhirnya mengakibatkan kinerja Perangkat Daerah kurang optimal. Hal ini disebabkan beberapa jabatan yang kosong dan belum terisi sampai dengan triwulan pertama Tahun 2025.

Harapannya dengan adanya kebijakan penjenjangan kinerja, perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan kinerja pegawai ASN kebutuhan pada jabatan yang kosong pada Perangkat Daerah dapat segera teratasi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Sehingga dapat berpengaruh pada kinerja Perangkat Daerah yang dapat lebih optimal lagi dan tidak terjadi *overload* beban kerja pada Perangkat Daerah.

1. Sarana dan Prasarana (Asset)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk memiliki 5 gedung kantor. Adanya sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Per Tahun 2024

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi			Jumlah
		Rusak Berat	Rusak Ringan	Baik	
1	AC	9	0	17	21
2	Laptop	3	2	8	13
3	PC Unit	1	0	7	8
4	Kipas Angin	2	0	10	12
5	Tanah dan Bangunan Gedung Kantor	0	0	3	3
6	Kursi Rapat Pejabat	0	0	4	4
7	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Filing Cabinet Besi	0	0	5	5
8	Kendaraan Roda 4	0	2	3	5
9	Kendaraan Roda 2	2	2	61	65
10	Kursi Kerja Pejabat, Kursi Kerja Pejabat Eselon	0	0	10	10
11	Peralatan Studio Audio, Peralatan Studio Visual, Proyektor dan Attachment	0	0	9	9
12	Mebeler Kursi Biasa	5	0	33	38
13	Mebeler Kursi Tamu	1	1	1	3
14	Mebeler Sofa	0	0	2	2

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Uraian analisis kondisi sarana dan prasarana di Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. AC berjumlah 21 unit, terdiri dari barang rusak berat berjumlah 4 Unit. Barang rusak ringan berjumlah 0. Barang yang baik berjumlah 17 Unit dengan rincian barang di Sekretariat 10 Unit, Bidang PJRSK 4 Unit, Bidang PSK 2 Unit, Bidang PP 2 Unit, Bidang PPA 2 Unit, dan PUSPAGA 1 Unit.
2. Laptop berjumlah 13 Unit, terdiri dari barang rusak berat berjumlah 3 Unit. Barang rusak ringan berjumlah 2 Unit. Barang yang baik berjumlah 8 Unit. Dengan rincian barang di Sekretariat 7 unit, Bidang PSK 2 unit, Bidang PJRSK 2 Unit, Bidang PP 1 unit, PUSPAGA 1 Unit dan UPT PPA 1 Unit.
3. PC Unit untuk administrasi perkantoran sebanyak 8 Unit, terdiri dari barang rusak berat berjumlah 1 Unit terdapat di gudang. Barang yang baik berjumlah 7 Unit. Dengan rincian barang di Sekretariat 5 Unit, Bidang PSk 1 Unit, Bidang PJRSK 1 Unit dan Bidang PPA 1 Unit.
4. Kipas Angin berjumlah 8 Unit, terdiri dari barang rusak berat berjumlah 2 terdapat di gudang. Barang yang baik berjumlah 10.
5. Tanah dan bangunan terdapat di 3 lokasi ditempati untuk bangunan Kantor Dinas, UPT PPA untuk penanganan Kasus KTPA, PUSPAGA, Fisioterapi dan Rumah Singgah untuk penanganan kasus PPKS/ PMKS,
6. Kursi Rapat Pejabat berjumlah 4 Unit terdapat di aula ruang rapat
7. Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor, Filing Cabinet Besi berjumlah 5 Unit.
8. Kendaraan Roda 4 untuk Operasional Dinas berjumlah 5 Unit terdiri dari dengan rincian Panther 2 Unit, Luxio (Molin) 1 Unit, Avanza 1 Unit, dan Ertiga 1 Unit.
9. Kendaraan Roda Dua Operasional Dinas berjumlah 65 unit terdiri dari barang rusak berat berjumlah 2 Unit terdapat di gudang. Barang rusak ringan berjumlah 2, dan Barang yang baik berjumlah 61 dengan rincian 3 unit untuk Sekretariat, 1 unit untuk Bidang PJRSK dan Bidang PSK 2 Unit, 3 Unit Bidang PA, 3 unit untuk Bidang PP, KLX 2 Unit untuk Tagana, Revo 21 Unit untuk PKH, KLX 2 Unit untuk PKH, Jupiter 19 Unit untuk TKSK.

10. Kursi Kerja Pejabat. Kursi Kerja Pejabat Eselon berjumlah 10 Unit dengan kondisi baik.
11. Peralatan Studio Audio, Peralatan Studio Visual, Proyektor dan Attachment berjumlah 9 Unit dengan kondisi baik.
12. Mebeler Kursi Biasa berjumlah 38 Unit, terdiri dari barang rusak berat berjumlah 5 Unit terdapat di gudang. Semua barang digunakan di aula ruang rapat.
13. Mebeler Kursi Tamu berjumlah 3 Unit, terdiri dari barang rusak berat berjumlah 1 Unit terdapat di gudang. Barang rusak ringan berjumlah 1, dan barang yang baik berjumlah 1.
14. Mebeler Sofa berjumlah 2 Unit dengan kondisi baik.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Sebelum Perubahan																			
1	Persentase penurunan PMKS	-	-	-	4,77%	-	-	-	-	5,59%	-	-	-	-	85,33%	-	-	-	-
2	Meningkatnya IDG	-	-	-	66,96	-	-	-	-	69,90 (BPS Tahun 2020)	-	-	-	-	104,39%	-	-	-	-
Setelah Perubahan																			
1	Tingkat kemiskinan	-	-	-	-	11,85%	11,80%	11,75%	-	-	9,71%	10,70%	10,89%	-	-	81,94%	90,67%	92,68%	-
2	Persentase penurunan PMKS/ PPKS	-	-	-	-	4,47%	4,17%	3,87%	-	-	4,76%	4,87%	4,97%	-	-	91,80%	81,51%	77,86%	-
3	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	-	-	-	93,36	94,68	94,98	-	-	93,26 (BPS Tahun 2020)	93,76 (BPS Tahun 2021)	93,89 (BPS Tahun 2022)	-	-	99,89%	99,02%	98,85%	-
4	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	-	-	-	69	71	72	-	-	69,90 (BPS Tahun 2020)	69,78 (BPS Tahun 2021)	70,87 (BPS Tahun 2022)	-	-	101,30%	98,28%	98,43%	-
Renstra 2024-2026																			
1	Persentase Penduduk Miskin Ekstrim	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0,46	-	-	-	-	108,69%
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	-	-	-	-	-	-	70,50	-	-	-	-	72,46 (Tahun 2023)	-	-	-	-	102,78%

Indikator Kinerja Utama merupakan Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dalam mengukur Indikator Kinerja Utama (IKU) memiliki dua Urusan, yaitu Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penjelasan terkait capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Bidang Urusan Sosial

Kondisi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang sebagian besar sebagai buruh tani masih banyak yang tergolong masyarakat miskin. Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Pengertian kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan karena kelangkaan pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses pada pendidikan dan kesehatan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Nganjuk per Maret Tahun 2024 sebesar 10,17% yang bersumber dari data BPS Kabupaten Nganjuk. Angka kemiskinan sering dipertentangkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan data mikro sehingga by name dan by addresnya ada. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang sekarang diganti dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN adalah singkatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang merupakan sistem data terbaru yang menggantikan DTKS sebagai basis utama penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) di Indonesia. DTSEN mengintegrasikan berbagai sumber data seperti DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran.

Pada tiga tahun terakhir rata-rata angka kemiskinan di Kabupaten Nganjuk masih relatif naik turun dan lebih tinggi dibanding dengan angka provinsi dan angka nasional. Meskipun secara umum presentasi kemiskinan di kabupaten Nganjuk menurun, tetapi penurunannya masih landai atau kurang tajam. Oleh karena itu perlu upaya yang lebih keras lagi dan dengan cara yang tetap untuk menurunkan angka kemiskinan. Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2024 lebih fokus pada penanganan terkait kemiskinan ekstrim. Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Inpres ini bertujuan untuk menghapus kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2024 melalui berbagai upaya terpadu.

Berdasarkan Tabel di atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2020-2024 mengacu pada Indikator Tujuan. Pencapaian kinerja dengan Tujuan ke-1 pada Tahun 2024, yaitu **"Mengurangi Penduduk Miskin"** di Kabupaten Nganjuk diperoleh capaian sebesar 108,69% pada Tahun 2024 dengan target 0,5 dan realisasi 0,46%. Hal tersebut mengacu pada Penanganan Penduduk Miskin di Kabupaten Nganjuk, di mana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Koordinator Pelaksana.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiokan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG dibawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Begitupula sebaliknya, jika IPG bernilai lebih dari 100 artinya capaian pembangunan laki-laki di bawah perempuan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terbentuk oleh tiga komponen, yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga. IDG

dihitung untuk melihat sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi.

Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender adalah salah satu ukuran yang mencerminkan kesejahteraan dan realisasi yang setara antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang signifikan tingkat kesejahteraan laki-laki dan perempuan di Kabupaten Nganjuk adalah perbedaan pendapatan rata-rata antara perempuan jauh lebih kecil dari laki-laki serta partisipasi perempuan dalam lembaga parlemen/DPRD serta jabatan-jabatan lain dalam pengambilan keputusan masih kurang.

Pencapaian Kinerja Tujuan ke-2 **"Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta Pemberdayaan Perempuan"** dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2024 Kabupaten Nganjuk sebesar 72,46 berdasarkan data BPS pada Tahun 2023.

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2020-2024

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Sebelum Perubahan																			
1	Persentase Jumlah PMKS/ PPKS yang Tertangani	100%	94%		90%	92%	-			93,09%	97,80%	-			97%	106,30%	-		
2	Persentase Jumlah PMKS/ PPKS menurun	100%	3,97%		7,94%	4,47%	-			5,97%	4,76%	-			80%	91,80%	-		
3	Persentase Jumlah PSKS yang Aktif	100%	60%		50%	55%	-			73,75%	68,37%	-			68%	124,30%	-		
4	Persentase ASN Perempuan yang Menduduki Jabatan Struktural Meningkat	100%	40%		30%	35%	-			33,68%	32,78%	-			89%	93,68%	-		
5	Persentase Kasus Tindak Kekerasan dan Trafficking terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya	100%	100%		100%	100%	-			100%	100%	-			100%	100%	-		
6	Persentase Kecamatan Layak Anak	100%	75%		5%	5%	-			25%	5%	-			100%	100%	-		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Setelah Perubahan																			
1	Persentase Jumlah PMKS/ PPKS yang Tertangani	100%	94%		-	-	94%	95%		-	-	99,26%	99.79%		-	-	106,38%	105.04%	
2	Persentase Jumlah PMKS/ PPKS menurun	100%	4,17		-	-	4,17	3.87%		-	-	4,87%	4.97%		-	-	85,62%	77.86%	
3	Persentase Jumlah PSKS yang Aktif	100%	60%		-	-	60%	65%		-	-	71,40%	75.35%		-	-	119%	115.92%	
4	Persentase ASN Perempuan yang Menduduki Jabatan Struktural Meningkat	100%	40%		-	-	40%	45		-	-	31,45%	35%		-	-	78,62%	77.77%	
5	Persentase Kasus Tindak Kekerasan dan Trafficking terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya	100%	100%		-	-	100%	100		-	-	100%	100%		-	-	100%	100%	
6	Persentase Kecamatan Layak Anak	100%	10%		-	-	10%	15		-	-	40%	55%		-	-	400%	366.66%	
Renstra 2024-2026																			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani	100%	94%						100%					100%					100%
2	Persentase jumlah PSKS yang aktif	100%	3,97%						72,50%					74,69%					103,02%
3	Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender	100%	60%						33,33%					100%					300,03%
4	Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya	100%	40%						100%					100%					100%
5	Skor Kabupaten Layak Anak	100%	100%						(650) Madya					0					0

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan Indikator untuk Mengukur Kinerja Perangkat Daerah di mana Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sama dengan Indikator Sasaran pada Renstra Tahun 2024-2026. Indikator Kinerja Kunci (IKK) memiliki dua Urusan, yaitu Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penjelasan terkait capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Urusan Sosial

Pencapaian kinerja dengan sasaran Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial dapat diukur dengan 2 indikator. ***Pertama*****,** Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani dengan kondisi capaian di akhir Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%. Hal tersebut berdasarkan data PMKS/PPKS tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.4 Data PMKS/PPKS Tahun 2024

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi	Kabupaten	Tahun	Jenis_PMKS	Jumlah_PMKS _Keseluruhan	Jumlah_PMKS_ yang Tertangani	Satuan
Jawa Timur	Nganjuk	2024	Keluarga Fakir Miskin	53,655	53,655	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	Anak Jalanan	14	14	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	Tuna Susila	14	14	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	Pengemis	1	1	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	Gelandangan dan Gelandangan Psikotik	40	40	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	Anak Balita Terlantar	0	0	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	Anak Terlantar	7	7	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	Anak Berhadapan dengan Hukum	44	44	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	**Anak dengan Kedisabilitasan:**	**63**	**63**	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	a. Tubuh	60	60	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	b. Netra	0	0	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	c. Cacat Wicara	0	0	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	d. Mental	2	2	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	e. Cacat Ganda	1	1	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan Diperlakukan Salah	0	0	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0	0	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	Lanjut Usia Terlantar	21	21	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	**Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis**	**72**	**72**	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	a. Tubuh	56	56	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	b. Netra	2	2	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	c. Cacat Wicara	0	0	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	d. Mental	14	14	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	e. Cacat Ganda	0	0	Orang

Provinsi	Kabupaten	Tahun	Jenis_PMKS	Jumlah_PMKS _Keseluruhan	Jumlah_PMKS_ yang Tertangani	Satuan
Jawa Timur	Nganjuk	2024	f. Penderita Penyakit Kronis	0	0	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	Pemulung	0	0	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	Kelompok Minoritas (Waria 108 dan Gay 980)	366	366	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	0	0	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	Orang dengan HIV / AIDS (ODHA)	2,484	2,484	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	Korban Penyalah Gunaan Napsa	1	1	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	Korban Trafficking	0	0	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	**Korban Tindakan Kekerasan atau yg Diperlakukan Salah**	**0**	**0**	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	a. Wanita	0	0	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	b. Laki - laki	0	0	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	c. Lanjut Usia	0	0	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	1	1	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	Korban Bencana Alam	375	375	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	Korban Bencana Sosial	0	0	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	0	0	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	Masyarakat Daerah Tertinggal dan Terpencil	0	0	Orang
Jumlah				**57,158**	**57,158**	Orang
Rata-Rata				**100**		**%**

Sumber : Bidang PJRSK

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai perangkat daerah yang mengampu 2 (dua) urusan, salah satunya urusan sosial dimana kinerja yang ditangani adalah penanganan PMKS/PPKS di Kabupaten Nganjuk melalui program Ksatria Sosial. Program Kstatria Sosial merupakan layanan untuk penjangkauan PMKS/PPKS guna mengatasi permasalahan sosial yang bergerak secara dinamis setiap bulan, triwulan, semester maupun dalam 1 tahun.

Data PMKS/PPKS yang ada pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan data penanganan atau data penjangkauan, berbeda halnya dengan data bantuan sosial dan hibah.

Bantuan Sosial yang ada pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu:

a. Bantuan Sosial Lansia Miskin, bantuan untuk lansia miskin di Nganjuk untuk meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan dasar
b. Bantuan Sosial Siswa Miskin, bantuan untuk siswa miskin dalam mendapatkan layanakan pendidikan dan meringankan beban dalam mendapatkan fasilitas pendidikan

c. Bantuan Sosial Disabilitas, bantuan guna meringankan dalam memenuhi kebutuhan dasar, dan sebagai alat bantu untuk mobilisasi kegiatan sehari-hari.
d. Hibah PMI, hibah uang untuk penanganan kedaruratan
e. Hibah WCC. Hibah uang untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga hal ini dapat menurunkan angka kekerasan di Kabupaten Nganjuk.

Berkaitan dengan penurunan angka kemiskinan ekstrim pada tahun 2025-2030 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk berkolaborasi dengan perangkat daerah lainnya.

Kedua, Persentase jumlah PSKS yang aktif dengan kondisi capaian di akhir Tahun 2024 sebesar 103,02% dari target sebesar 72,5%. Data tersebut diperoleh berdasarkan data Jumlah PSKS Tahun 2024, yaitu:

Tabel 2.5 Jumlah PSKS Tahun 2024

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi	Kabupaten	Tahun	Jenis_PSKS	Jumlah_PSKS_yang_Aktif	Jumlah_PSKS_yang_Ada	Satuan
Jawa Timur	Nganjuk	2024	Pekerja Sosial Profesional	4	4	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	80	117	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	18	18	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	Organisasi Sosial	22	27	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	Karang Taruna	222	305	Orang
Jawa Timur	Nganjuk	2024	TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat)	20	19	Orang
Jumlah				**366**	**490**	**Orang**
Rata rata				**74.69**		**%**

Sumber : Bidang PSK

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pencapaian kinerja dengan sasaran **"Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak"** dapat diukur dengan 3 indikator. ***Pertama,*** Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender dengan kondisi capaian di akhir Tahun 2024 sebesar 300,03% dari target sebesar 33,33%. ***Kedua***, Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya dengan kondisi capaian di akhir Tahun 2024

sebesar 100% dari target sebesar 100%. ***Ketiga***, Skor Kabupaten Layak Anak dengan kondisi capaian di akhir Tahun 2024 sebesar 0 dari target Skor (650) Madya. Hal ini belum dapat tercapai dikarenakan penilaian Kabupaten Layak Anak dilaksanakan 2 Tahun sekali berbeda pada awal perencanaan penilaian dilakukan setiap satu tahun sekali, sehingga hasil pada Tahun 2024 masih dalam poroses evaluasi.

Kasus kekerasan yang terjadi merupakan fenomena yang perlu diperhatikan oleh Orang Tua, Instutusi Pendidikan dan Lembaga Perlindungan Anak. Tahun 2023-2024 jumlah kasus kekerasan meningkat. Diduga penyebabnya antara lain adalah:

1. Rendahnya kesadaran hukum bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
2. Adanya budaya patriarki yang masih tinggi
3. Keadaan ekonomi atau tingginya tingkat kemiskinan
4. Adanya isu perselingkuhan dan pernikahan dini
5. Rendahnya pengetahuan orang tua dalam pengasuhan anak
6. Pengaruh lingkungan yang tidak kondusif
7. Dampak perkembangan teknologi yang disalahgunakan

Berikut ini data Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terlaporkan dan telah selesai ditangani sesuai dengan jenis layanan yang diperlukan pada Tahun 2024.

Tabel 2.6

Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

yang Telah Ditangani Tahun 2024

Data Kasus Kekerasan Pada Anak Menurut Bentuk Kekerasan Selama Tahun 2024

No	Inisial	Jenis Kelamin	Umur	Bentuk Kekerasan						
				Fisik	Psikis	Seksual	Eksploitasi	Trafificking	Penelataran	Lainnya
1	HS	P	11	-	√	-	-	-	-	-
2	PD	P	16	-	-	√	-	-	-	-
3	KNH	P	12	√	-	-	-	-	-	-
4	JW	P	11	√	-	-	-	-	-	-
5	S	P	16	-	-	√	-	-	-	-
6	AFS	P	17	-	-	√	-	-	-	-
7	CAP	P	12	-	√	-	-	-	-	-
8	SDA	P	16	-	-	-	-	-	-	√
9	RA	P	17	-	-	√	-	-	-	-
10	NMN	P	13	-	√	-	-	-	-	-
11	TAS	L	15	-	√	-	-	-	-	-
12	DRP	P	16	-	√	-	-	-	-	-
13	IKA	P	17	√	-	-	-	-	-	-
14	SWR	P	16	√	-	-	-	-	-	-
15	HACA	P	17	√	-	-	-	-	-	-
16	GAM	P	15	√	-	-	-	-	-	-
17	FEP	P	7	-	√	-	-	-	-	-
18	KPN	P	4	-	-	-	-	-	-	√
19	AHM	L	15	-	√	-	-	-	-	-
20	MRR	L	13	-	-	-	-	-	-	√
21	MRAP	L	11	-	√	-	-	-	-	-
22	NF	L	15	-	√	-	-	-	-	-
23	NAN	P	16	√	-	-	-	-	-	-
24	M/S	P	16	√	-	-	-	-	-	-
25	RAA	P	16	-	-	-	-	-	-	√
26	GAW	P	16	-	-	√	-	-	-	-
27	NSD	P	14	-	-	√	-	-	-	-
28	AKCF	P	16	-	-	√	-	-	-	-
29	IL	P	3	-	-	√	-	-	-	-
30	MIA	L	15	-	-	√	-	-	-	-
31	MNH	P	5	√	-	-	-	-	-	-
32	MAU	L	6	√	-	-	-	-	-	-
33	AMA	P	3	√	-	-	-	-	-	-
34	AAA	P	17	-	-	√	-	-	-	-
35	GSP	L	16	-	-	√	-	-	-	-
36	MMU	P	16	-	-	√	-	-	-	-
37	JDA	P	16	-	√	-	-	-	-	-
38	HSS	P	17	-	-	√	-	-	-	-
JUMLAH				**11**	**10**	**13**	**0**	**0**	**0**	**4**

Sumber : Bidang PPA

Data Kasus Kekerasan pada Perempuan Menurut Bentuk Kekerasan Selama Tahun 2024

No	Inisial	Jenis Kelamin	Umur	Bentuk Kekerasan						
				Fisik	Psikis	Seksual	Eksploitasi	Trafificking	Penelataran	Lainnya
1	MS	P	24	-	-	-	-	-	-	√
2	DT	P	53	-	√	-	-	-	-	-
3	RA	P	42	-	√	-	-	-	-	-
4	YD	P	23	-	√	-	-	-	-	-
5	DA	P	29	-	-	√	-	-	-	-
6	AA	P	34	-	√	-	-	-	-	-
7	AS	P	50	-	-	-	-	-	√	-
8	IR	P	30	-	√	-	-	-	-	-
9	NR	P	38	√	-	-	-	-	-	-
10	FD	P	24	-	√	-	-	-	-	-
11	AA	P	53	-	√	-	-	-	-	-
12	H	P	40	-	√	-	-	-	-	-
13	DS	P	43	√	-	-	-	-	-	-
14	SR	P	42	√	-	-	-	-	-	-
15	AS	P	38	√	-	-	-	-	-	-
16	LP	P	20	-	-	-	-	-	-	√
17	UH	P	35	√	-	-	-	-	-	-
18	EP	P	46	-	√	-	-	-	-	-
19	VZ	P	27	-	√	-	-	-	-	-
20	RAB	P	18	-	-	-	-	-	√	-
21	SW	P	42	√	-	-	-	-	-	-
22	UK	P	46	√	-	-	-	-	-	-
23	SK	P	46	-	√	-	-	-	-	-
24	FT	P	36	√	-	-	-	-	-	-
25	F	P	32	-	√	-	-	-	-	-
26	W	P	44	-	√	-	-	-	-	-
27	SAP	P	20	√	-	-	-	-	-	-
28	SS	P	35	-	√	-	-	-	-	-
29	NR	P	55	-	√	-	-	-	-	-
30	DAK	P	25	-	√	-	-	-	-	-
31	FK	P	25	-	√	-	-	-	-	-
32	SR	P	45	-	√	-	-	-	-	-
33	DI	P	23	-	-	√	-	-	-	-
34	S	P	46	-	√	-	-	-	-	-
35	TD	P	42	-	√	-	-	-	-	-
36	IKS	P	24	-	√	-	-	-	-	-
37	JA	P	50	-	√	-	-	-	-	-
38	JU	P	33	-	√	-	-	-	-	-
39	M	P	59	√	-	-	-	-	-	-
40	IW	P	38	√	-	-	-	-	-	-
Jumlah				**11**	**23**	**2**	**0**	**0**	**2**	**2**

Sumber : Bidang PPA

Perlindungan anak merupakan suatu hal yang sangat penting karena anak adalah generasi yang akan datang sehingga wajib dilindungi dari segala hal yang dapat memberikan dampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangannya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Disisi lain dalam SDGs khususnya pada *Goal* 11 mengenai kota dan hunian yang inklusif, aman dan berkelanjutan dan *Goal* 16 mengenai masyarakat yang damai, tanpa kekerasan, pemerintahan yang akuntabel, antikorupsi dan non–diskriminasi, secara eksplisit bertujuan ingin menciptakan kota dan hunian yang inklusif dan aman termasuk bagi anak selain itu menghendaki adanya masyarakat yang hidup tanpa kekerasan terlebih-lebih pada anak. Hal ini menunjukan bahwa perlindungan anak menjadi perhatian besar bagi dunia internasional.

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Sebelum Perubahan																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantor	558.895.700					487.671.828					87,30%					558.895.700	487.671.828
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.031.244.000					1.059.494.508					102,70%					1.031.244.000	1.059.494.508
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5.000.000					4.800.000					96,00%					5.000.000	4.800.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Refocusing					Refocusing					-					Refocusing	Refocusing
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	23.658.000					22.652.000					95,75%					23.658.000	22.652.000
Program Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial	1.109.508.900					1.062.196.235					95,74%					1.109.508.900	1.062.196.235
Program Pembinaan Para	Refocusing					Refocusing					-					Refocusing	Refocusing

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Penyandang Cacat dan Trauma/ Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)																	
Program Pemberdayaan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	542.850.500					482.549.500					88,89 %					542.850.500	482.549.500
Program Perlindungan Perempuan dan Anak	495.992.500					418.505.025					84,38 %					495.992.500	418.505.025
Program Kesetaraan Gender dan Peran Aktif Masyarakat	327.241.800					258.438.275					78,97 %					327.241.800	258.438.275
Sesudah Perubahan																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		4.037.893.150	5.301.529.956	5.023.000.318			3.950.914.629	4.919.000.258,20	4.643.730.600			97,85 %	92,78%	92,45%		4.787.474.475	4.504.548.496
Program Pemberdayaan Sosial		325.366.950	347.516.950	417.627.800			270.740.450	331.193.330,40	407.733.128			83,21 %	95,30%	97,63%		363.503.900	336.555.636
Program Rehabilitasi Sosial		4.112.470.700	10.213.935.950	7.659.039.750			7.132.244.200	7.747.075.065,60	7.550.604.767			173,43%	75,85%	98,58%		7.328.482.133	7.476.641.344
Program Perlindungan dan		812.259.850	3.817.499.850	3.861.787.700			759.023.350	3.472.660.850	3.811.601.200			93,45 %	90,97%	98,70%		2.830.515.800	2.681.095.133

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Jaminan Sosial																	
Program Penanganan Bencana		240.999.800	5.908.840.750	217.478.050			239.685.450	5.575.995.554	215.904.500			99,45%	94,37%	99,28%		2.122.439.533	2.010.528.501
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		34.397.250	53.882.850	68.029.500			28.176.600	51.658.090	60.371.872			81,92%	95,87%	88,74%		52.103.200	46.735.521
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		186.155.000	244.600.000	215.885.000			131.859.500	235.875.177	199.181.550			70,83%	96,43%	92,26%		215.546.667	188.972.076
Program Perlindungan Perempuan		18.724.100	93.724.100	172.873.900			17.675.000	91.874.100	172.386.000			94,40%	98,03%	99,72%		95.107.367	93.978.367
Program Peningkatan Kualitas Keluarga		37.843.000	147.667.550	116.346.500			36.526.500	132.959.340,40	109.614.629			96,52%	90,04%	94,21%		100.619.017	93.033.490
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		0	17.530.000	17.530.000			0	16.688.686,40	16.433.286			0,00%	95,20%	93,74%		11.686.667	11.040.657
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		169.728.600	223.506.600	110.968.400			60.171.250	206.682.056	108.742.467			35,45%	92,47%	97,99%		168.067.867	125.198.591
Program Perlindungan Khusus Anak		80.580.000	68.580.000	154.254.400			78.120.000	64.889.404	141.269.090			96,95%	94,62%	91,58%		101.138.133	94.759.498
Renstra Tahun 2024-2026																	
Program Penunjang Urusan					5.177.843.900					4.960.667.569					95,81%	5.177.843.900	4.960.667.569

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota																	
Program Pemberdayaan Sosial					366.882.750					360.609.750					98,29%	366.882.750	360.609.750
Program Rehabilitasi Sosial					1.890.708.200					2.375.312.174					125,63%	1.890.708.200	2.375.312.174
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					12.089.917.200					11.151.015.149					92,23%	12.089.917.200	11.151.015.149
Program Penanganan Bencana					340.937.450					320.808.500					94,10%	340.937.450	320.808.500
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan					70.037.750					67.439.900					96,29%	70.037.750	67.439.900
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan					340.860.000					308.574.000					90,53%	340.860.000	308.574.000
Program Perlindungan Perempuan					222.826.800					209.186.000					93,88%	222.826.800	209.186.000
Program Peningkatan Kualitas Keluarga					145.971.050					144.329.238					98,88%	145.971.050	144.329.238
Program Pengelolaan Sistem Data					18.530.000					17.684.394					95,44%	18.530.000	17.684.394

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Gender dan Anak																	
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)					372.324.650					356.207.194					95,67 %	372.324.650	356.207.194
Program Perlindungan Khusus Anak					172.984.400					168.980.591					97,69 %	172.984.400	168.980.591

Sehubungan dengan telah diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar, bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu Pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Bidang Urusan Sosial.

Urusan Sosial menjadi salah satu urusan wajib yang diberikan standarisasi pelayanan minimal dalam rangka penyelenggaraan pelayanan urusan Sosial terutama pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti dan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

No	Indikator	Target SPM	IKK	Target					Realisasi					Proyeksi	Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Jumlah warga negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%		100%	85,71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Jumlah warga negara korban bencana daerah yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Sumber : SPM Dinas Sosial PPPA

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial menjadi hal yang mutlak untuk diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah, dengan adanya optimalisasi Bidang Sosial melalui implementasi standar pelayanan minimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Pelaksanaan tersebut bukan hal yang mudah, namun memerlukan perumusan secara lebih terstruktur dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pada setiap hasil program dan kegiatan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan pada hasil evaluasi dan pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial pada tahun sebelumnya bahwa pencapaiannya rata-rata sebesar 100%. Untuk memperoleh hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka dibutuhkan data yang valid. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah pendataan yang bersifat integratif lintas sektoral agar data semakin efektif sesuai dengan yang berhak untuk direhabilitasi dan ditangani.

4.1.1 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengampu 2 urusan, yaitu Urusan Bidang Sosial dan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Urusan Bidang Sosial kelompok sasarannya sesuai dengan Permensos No 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dengan 26 Kriteria PMKS/ PPKS sebagai berikut:

1. Keluarga Fakir Miskin
2. Anak Jalanan
3. Tuna Susila
4. Pengemis
5. Gelandangan dan Gelandangan Psikotik
6. Anak Balita Terlantar
7. Anak Terlantar
8. Anak Berhadapan dengan Hukum
9. Anak dengan Kedisabilitasan
    b. Tubuh
    c. Netra
    d. Cacat Wicara
    e. Mental
    f. Cacat Ganda
10. Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan Diperlakukan Salah
11. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
12. Lanjut Usia Terlantar
13. Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis
    a. Tubuh
    b. Netra
    c. Cacat Wicara
    d. Mental
    e. Cacat Ganda
    f. Penderita Penyakit Kronis
14. Pemulung
15. Kelompok Minoritas (Waria 108 dan Gay 980)
16. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
17. Orang dengan HIV / AIDS (ODHA)

18. Korban Penyalah Gunaan Napsa
19. Korban Trafficking
20. Korban Tindakan Kekerasan atau yg Diperlakukan Salah
    a. Wanita
    b. Laki-Laki
    c. Lanjut Usia
21. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
22. Korban Bencana Alam
23. Korban Bencana Sosial
24. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Masyarakat Daerah Tertinggal dan Terpencil.

Sedangkan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kelompok sasarannya adalah Anak usia 0-18 Tahun termasuk yang dalam kandungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perempuan usia di atas 18 Tahun sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri PPA No 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan PPA, Lembaga Pemerintah (Perangkat Daerah, Desa/ Kelurahan, dan Instansi Pemerintah), Lembaga Swadaya Masyarakat, PKK Kabupaten, PKK Kecamatan, PKK Desa/ Kelurahan, Lembaga Sekolah, dan Keluarga.

4.1.5 Mitra Dinas Sosial PPPA dalam Pemberian Layanan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan layanan yang di dukung oleh beberapa mitra kerja sehingga dalam pelaksanaannya terdapat koordinasi yang baik, sebagai berikut:

1. Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk
2. PPA Polres Kabupaten Nganjuk
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7. Dinas PMD Kabupaten Nganjuk
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk
9. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nganjuk
10. BAPPEDA Kabupaten Nganjuk

11. Satpol PP Kabupaten Nganjuk
12. BPBD Kabupaten Nganjuk
13. Bakesbangpol Kabupaten Nganjuk
14. BPJS Kabupaten Nganjuk
15. BPS Kabupaten Nganjuk
16. RSUD Kertosono Kabupaten Nganjuk
17. RSUD Nganjuk Kabupaten Nganjuk
18. Pengadilan Agama
19. Kementerian Agama
20. Universitas PGRI Mpu Sindok (UPMS) Nganjuk
21. PMI Kabupaten Nganjuk
22. WCC Kabupaten Nganjuk
23. Forum Puspa Kabupaten Nganjuk
24. SAPA MAMA Kabupaten Nganjuk
25. Karang Taruna Kabupaten Nganjuk
26. PSM Kabupaten Nganjuk
27. PKH Kabupaten Nganjuk
28. TKSK Kabupaten Nganjuk
29. Forum Anak Kabupaten Nganjuk
30. TP. PKK
31. GOW
32. LKSA

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

2.2.1 Identifikasi Permasalahan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah terkait tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

Permasalahan Sosial

1. Tidak adanya Data Base PPKS/PMKS di Kabupaten Nganjuk;
2. Sarana dan Prasarana Pendukung Layanan bagi PPKS/PMKS belum Memadai;
3. Perlu adanya Peningkatan Kapasitas SDM PSKS dalam Pendataan dan Penanganan PPKS/PMKS;
4. Perlu adanya Pelaksanaan Pemberdayaan bagi PPKS/PMKS;

5. Kurangnya Pemahaman bagi Masyarakat tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Uang Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) yang berpotensi mengandung unsur penipuan dan kerugian masyarakat.

Permasalahan PPPA

1. Kurangnya Pemahaman dan Penerapan Gender di Masyarakat;
2. Belum Optimalnya Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Gender Mainstreaming dan Gender Budgeting;
3. Tingginya Angka Kekerasan Perempuan dan Anak;
4. Rendahnya Perlindungan terhadap Tenaga Kerja dan Buruh Migran Perempuan;
5. Tingginya Perkawinan Anak Usia Dini;
6. Tingginya Tindak Kekerasan akibat Pengaruh dari Media Online.

2.2.1 Isu Strategis

Penentuan Isu-isu Strategis dalam lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk merupakan upaya penanganan masalah pada Urusan Sosial dan Urusan PPPA, sehingga perlu adanya penentuan isu strategis sebagai berikut :

Isu Strategis Urusan Sosial:

1. Terbentuknya Data Base PPKS/PMKS;
2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Layanan bagi PPKS/ PMKS;
3. Adanya Bimtek dan Evaluasi bagi PSKS;
4. Adanya Kegiatan Pemberdayaan serta Monev Keberlanjutan bagi PPKS/PMKS;
5. Penerbitan Pengumpulan Uang Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dengan dikeluarkannya Surat Rekomendasi.

Isu Strategis Urusan PPPA:

1. Penguatan Sosialisasi dan Edukasi tentang Kesetaraan Gender kepada Masyarakat
2. Peningkatan kapasitas dan peran Perangkat Daerah dalam implementasi gender
3. Peningkatan Layanan Kekerasan Perempuan dan Anak serta Korban TPPO
4. Optimalisasi Pemenuhan Hak Anak

Tabel 2.9 Teknik Menyimpulan Isu Strategis

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVA DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Pengentasan kemiskinan dan pengangguran	**Data dan Informasi**		**Perubahan iklim dan bencana alam**	**Penanganan Kemiskinan**	**Penanganan Kemiskinan**	**Penyediaan Data yang Akurat**
Pemberian Bantuan Sosial bagi Lansia Miskin, Penyandang Disabilitas, Siswa Miskin dan LKSA	Tidak adanya Data Base PPKS/PMKS di Kabupaten Nganjuk		Penguatan skill dalam menghadapi Peruabahan Iklim dan Bencana Alam	Adanya Pemberian Bantuan kepada masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru	Adanya Pencegahan dan pengentasan kemiskinan	Adanya Verifikasi dan Validasi Data PPKS/ PMKS
Pemberdayaan bagi PPKS/PMKS	Data PPKS/ PMKS yang masih perlu validasi secara berkelanjutan		**Ketidakadilan sosial dan diskriminasi**			Terbentuknya Data Base PPKS/PMKS
Pemberian Bantuan bagi PPKS/PMKS	**Sarana dan Prasarana**		Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan bagi Masyarakat			**Pemenuhan Sarana dan Prasarana**
	Sarana dan Prasarana Pendukung Layanan bagi PPKS/PMKS belum Memadai					Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Layanan bagi PPKS/ PMKS
	Sumber Daya Manusia					**Peningkatan Kualitas SDM**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVA DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	Perlu adanya Peningkatan Kapasitas SDM PSKS dalam Pendataan dan Penanganan PPKS/PMKS					Adanya Bimtek dan Evaluasi bagi PSKS
	Perlu adanya Pelaksanaan Pemberdayaan bagi PPKS/PMKS					Adanya Kegiatan Pemberdayaan serta Monev Keberlanjutan bagi PPKS/PMKS
	Informasi					**Pemahaman bagi Masyarakat**
	Kurangnya Pemahaman bagi Masyarakat tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Uang Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) yang berpotensi mengandung unsur penipuan dan kerugian masyarakat					Penerbitan Pengumpulan Uang Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dengan dikeluarkannya Surat Rekomendasi
Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender	**Pengarusutamaan Gender**		**Ketimpangan Gender**	**Ketimpangan Gender**	**Ketimpangan Gender**	**Peningkatan Pemahaman PUG**
Meningkatnya Pemahaman Pengarusutamaan Gender bagi Masyarakat	Kurangnya Pemahaman dan Penerapan Gender di Masyarakat		Keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek	Mangupayakan persamaan hak dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kekerasan dan diskriminasi gender	Penguatan Sosialisasi dan Edukasi tentang Kesetaraan Gender kepada Masyarakat

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVA DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Pengoptimalan Puskesmas Ramah Anak dan Sekolah Ramah Anak	Belum Optimalnya Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Gender Mainstreaming dan Gender Budgeting		Terciptanya Hak Asasi Manusia			Peningkatan kapasitas dan peran Perangkat Daerah dalam implementasi gender
Terselesaikannya Penanganan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak	**Kekerasan Perempuan dan Anak**		**Kabupaten Layak Anak**	**Kabupaten Layak Anak**	**Kabupaten Layak Anak**	**Peningkatan Penanganan Kasus Kekerasan**
	Tingginya Angka Kekerasan Perempuan dan Anak		Terpenuhinya Hak Anak secara efektif dan efesien	Terciptanya Pemenuhan hak dan perlindungan anak	Membangun sistem pembangunan yang berpihak pada anak	Peningkatan Layanan Kekerasan Perempuan dan Anak serta Korban TPPO
	Rendahnya Perlindungan terhadap Tenaga Kerja dan Buruh Migran Perempuan		Meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dan memiliki payung hukum dalam bentuk Undang-Undang Perlindungan Anak	Peningkatan komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan		Optimalisasi Pemenuhan Hak Anak
	Tingginya Perkawinan Anak Usia Dini					
	Tingginya Tindak Kekerasan akibat Pengaruh dari Media Online					

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk adalah Organisasi Perangkat Daerah Teknid yang dibentuk sesuai Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk yang mempunyai tugas di Bidang Urusan Sosial dan PPPA. Sejalan dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Periode Tahun 2025-2030, maka diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode Tahun 2025-2029 yang dapat dijabarkan dalam Visi, Misi dan Tujuan sebagai berikut:

Visi

"MEWUJUDKAN KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT"

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD yang sesuai dengan pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

Misi Ke-4

"MENINGKATKAN KUALITAS, PELAYANAN, MUTU PENDIDIKAN DAN KESEHATAN UNTUK MENGHASILKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS"

Sebagai bentuk penjabaran dari visi dan misi RPJMD ditetpakan tujuan dan sasaran RPJMD. Dinas Sosial mendukung dua tujuan RPPJMD. Tujuan RPJMD pertama yang diampu oleh dinas Sosial PPA adalah Terwujudnya Sumber daya manusia yang berkualitas dengan sasaran meningkatnya kesetaraan gender, sedangkan tujuan RPJMD kedua adalah meningkatnya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan dengan sasaran meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif.

3.1.1 Tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

Penetapan tujuan merupakan bagian proses perumusan Rancangan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, dalam prosesnya tujuan ditetapkan berdasarkan hasil kajian strategis dan keberhasilan visi dan misi. Beranjak dari Tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersebut diatas, maka Tujuan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut:

1. **Meningktanya Perlindungan Sosial yang Adaptif**
   - Indikator : Indeks Kesejahteraan Sosial
2. **Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak**
   - Indikator : Indeks Pembangunan Gender
     Indeks Perlindungan Anak

3.1.2 Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

Sasaran adalah target yang terukur sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran harus spesifik dan dapat diukur dalam bentuk Indikator Sasaran. Sasaran Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut:

1. **Meningkatnya fungsi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)**
   Indikator : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kemampuan fungsi sosialnya
2. **Meningkatnya Peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**
   Indikator : Persentase PSKS yang Aktif
3. **Meningkatnya Pemberdayaan Gender**
   Indikator : Indeks Pemberdayaan Gender
4. **Meningkatnya kapasitas dan kolaborasi antar lembaga perlindungan anak**
   Indikator : Indeks Perlindungan Khusus Anak
   Indeks Pemenuhan Hak Anak

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
- Meningkatnya kesetaraan gender - Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif	Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak		Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	62,61	62,67	62,73	62,79	62,85	62,91	62,97	
			Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	94,18	94,28	94,38	94,5	94,6	94,7	94,8	
			Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	70,31	70,35	70,35	70,38	70,38	70,4	70,4	
		Meningkatnya Fungsi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Meningkat Kemampuan Fungsi Sosialnya (%)	49,9	49,95	50	50,1	50,15	50,2	50,25	
		Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif (%)	74,69	75,24	75,5	76,43	77,02	77,69	78	
		Meningkatnya Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (Indeks)	72,46	72,6	72,89	72,93	72,98	73,05	73,1	
		Meningkatnya Kapasitas dan Kolaborasi antar Lembaga Perlindungan Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	65,57	65,6	65,6	65,65	65,7	65,75	65,8	
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	85,32	85,4	85,4	85,45	85,5	85,55	85,6	

3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran sebagai berikut:

Strategi

1. Mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata kepada masyarakat serta optimalisasi program pemberdayaan masyarakat.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak perempuan dan anak.
4. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan
5. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencangkup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulanganreintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.

Meningkatkan peran serta, keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak.

Tabel 3.1 Penahapan Renstra
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Nganjuk

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap Tahap V
-2026	-2027	-2028	-2029	-2030
Program Unggulaan 3 Pengentasan kemiskinan dan pengangguran	**Program Unggulaan 3 Pengentasan kemiskinan dan pengangguran**	**Program Unggulaan 3 Pengentasan kemiskinan dan pengangguran**	**Program Unggulaan 3 Pengentasan kemiskinan dan pengangguran**	**Program Unggulaan 3 Pengentasan kemiskinan dan pengangguran**
Pemberian Bantuan Sosial bagi Lansia Miskin, Penyandang Disabilitas, Siswa Miskin, dan LKSA; Penanganan dan Pelayanan bagi PMKS/PPKS; Mengupdate Data Penerima Bantuan agar Bantuan yang disalurkan Tepat Sasaran; Besinergi dengan Kementerian Sosial, Dinas Provinsi, Lintas Perangkat Daerah, dan Stakeholder	Pemberian Bantuan Sosial bagi Lansia Miskin, Penyandang Disabilitas, Siswa Miskin, dan LKSA; Penanganan dan Pelayanan bagi PMKS/PPKS; Mengupdate Data Penerima Bantuan agar Bantuan yang disalurkan Tepat Sasaran; Besinergi dengan Kementerian Sosial, Dinas Provinsi, Lintas Perangkat Daerah, dan Stakeholder	Pemberian Bantuan Sosial bagi Lansia Miskin, Penyandang Disabilitas, Siswa Miskin, dan LKSA; Penanganan dan Pelayanan bagi PMKS/PPKS; Mengupdate Data Penerima Bantuan agar Bantuan yang disalurkan Tepat Sasaran; Besinergi dengan Kementerian Sosial, Dinas Provinsi, Lintas Perangkat Daerah, dan Stakeholder	Pemberian Bantuan Sosial bagi Lansia Miskin, Penyandang Disabilitas, Siswa Miskin, dan LKSA; Penanganan dan Pelayanan bagi PMKS/PPKS; Mengupdate Data Penerima Bantuan agar Bantuan yang disalurkan Tepat Sasaran; Besinergi dengan Kementerian Sosial, Dinas Provinsi, Lintas Perangkat Daerah, dan Stakeholder	Pemberian Bantuan Sosial bagi Lansia Miskin, Penyandang Disabilitas, Siswa Miskin, dan LKSA; Penanganan dan Pelayanan bagi PMKS/PPKS; Mengupdate Data Penerima Bantuan agar Bantuan yang disalurkan Tepat Sasaran; Besinergi dengan Kementerian Sosial, Dinas Provinsi, Lintas Perangkat Daerah, dan Stakeholder
Program Unggulaan 10 Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender	**Program Unggulaan 10 Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender**	**Program Unggulaan 10 Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender**	**Program Unggulaan 10 Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender**	**Program Unggulaan 10 Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender**
Pelaksanaan Sosialisasi tentang Pengarusutamaan Gender; Sosialisasi pada Puskesmas Ramah Anak dan Sekolah Ramah Anak	Bersinergi dengan Kementerian PPPA, Dinas Provinsi, Lintas Perangkat Daerah dan Lembaga Terkait	Pelaksanaan evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Mewujudkan Kabupaten Layak Anak	Peningkatan Kualitas Penilaian Kabupaten Layak Anak	

3.3 Arah Kebijakan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perlindungan sosial dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
2. Peningkatan pemberdayaan lembaga masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG;
4. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang;
5. Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait pemenuhan hak anak.

Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1		(M4) Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas	Penyelenggaraan perlindungan sosial dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	
			Peningkatan pemberdayaan lembaga masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	
			Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG	
			Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang	
			Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait pemenuhan hak anak	

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
- Meningkatnya kesetaraan gender - Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif	Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak				Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)		
					Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)		
					Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)		
		Meningkatnya Fungsi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Meningkat Kemampuan Fungsi Sosialnya (%)		
			Meningkatnya akuntabilitas		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			kinerja Perangkat Daerah			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Substansi	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang	1.06.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.06.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.06.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai yang Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.06.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.06.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.06.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Peralatan dan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Perlengkapan Pelayanan Perkantoran Yang Layak Pakai			
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1.06.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran Yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial		Persentase PPKS di luar SPM kecuali HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Terpenuhinya Kebutuhan Dasar	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				PPKS sesuai dengan SPM		Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen	1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Orang)	1.06.04.2.01.0015 - Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	
					Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0016 - Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0017 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan	
					Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (Orang)	1.06.04.2.01.0018 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	
				Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PPKS di luar SPM kecuali HIV/ AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Aduan)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0001 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0002 - Pemberian Layanan Kedaruratan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan	1.06.04.2.02.0003 - Penyediaan Permakanan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		
					Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0004 - Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0005 - Penyediaan Alat Bantu	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0006 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
					Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0008 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
					Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0009 - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0010 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0012 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0013 - Pemberian Layanan Rujukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0015 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS)	
					Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya (Orang)	1.06.04.2.02.0016 - Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	
					Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Aduan)	1.06.04.2.02.0017 - Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Terlaksananya Pembinaan bagi Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi (Orang)	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01.0002 - Rujukan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01.0003 - Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	
					Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi (Orang)	1.06.05.2.01.0004 - Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	
				Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi Fakir Miskin Penerima Manfaat	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02.0009 - Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	
					Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah (Orang)	1.06.05.2.02.0010 - Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana		Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
				Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bancana Alam dan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
				Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bancana Alam dan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
				Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	
				Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bancana Alam dan Sosial	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
				Terlaksananya Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana (Orang)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi (Desa/Kelurahan)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai (Keluarga)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan (Orang)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi (Orang)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan	1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
					Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	1.06.06.2.02.0003 - Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	
					Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi (Desa/Kelurahan)	1.06.06.2.02.0005 - Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	
					Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi (Orang)	1.06.06.2.02.0006 - Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	
					Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai (Keluarga)	1.06.06.2.02.0007 - Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	
					Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana (Orang)	1.06.06.2.02.0008 - Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	
					Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan (Orang)	1.06.06.2.02.0011 - Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						pada masyarakat di lokasi rawan bencana	
		Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial			Persentase PSKS yang Aktif (%)		
			Meningkatnya Peran TKSK dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		Persentase TKSK yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin UGB dan PUB sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
				Terlaksananya Pengembangan Potensi TKSK	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (Orang)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial (Orang)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang	1.06.02.2.03.0010 - Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					memperoleh penghargaan dan santunan sosial (Orang)	Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (Orang)	1.06.02.2.03.0011 - Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang)	1.06.02.2.03.0015 - Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	
			Meningkatnya Pengelolaan TMP		Persentase TMP yang terkelola dengan baik (%)	1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
				Terlaksananya Pemeliharaan Makam Pahlawan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.07.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.07.2.01.0005 - Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Pemberdayaan Gender (IDG)			Indeks Pemberdayaan Gender (Indeks)		
			Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG		Persentase ARG (%)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Meningkatnya Peran Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Peran serta Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Ekonomi dan Sosial melalui Pelatihan dan Sosialisasi (%)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG	Terlaksananya PD yang Memiliki PPRG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	
					Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	2.08.02.2.01.0010 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.08.02.2.01.0012 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.02.2.01.0014 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Peran Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM bagi Perempuan	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
					Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	2.08.02.2.02.0005 - Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.02.0006 - Pendampinganlembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	2.08.02.2.02.0007 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Pelayanan Pemberdayaan Perempuan	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	2.08.02.2.03.0008 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	2.08.02.2.03.0009 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
			Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
				Terlaksananya Layanan dan	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Pendampingan Korban Kekerasan		Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan)	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	2.08.03.2.01.0003 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.03.2.01.0004 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan)	2.08.03.2.01.0007 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Layanan Rujukan Korban Kekerasan bagi Perempuan	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkatan/Kota (Orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkatan/Kota (Orang)	2.08.03.2.02.0004 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.2.02.0006 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi (Laporan)	2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)	2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)	2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.03.2.03.0005 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi (Laporan)	2.08.03.2.03.0006 - Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)	2.08.03.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)	2.08.03.2.03.0009 - Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Peran Lembaga dalam Peningkatan Kualitas Keluarga		Persentase Lembaga yang Aktif dalam Peningkatan Kualitas Keluarga (%)	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
				Terlaksananya Evaluasi Data Keluarga yang Mendapat Layanan	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan)	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen)		
					Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.2.01.0004 - Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	
					Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan)	2.08.04.2.01.0005 - Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
					proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen)	2.08.04.2.01.0007 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas	2.08.04.2.02.0004 - monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.04.2.02.0005 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	2.08.04.2.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.2.02.0008 - Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Layanan bagi Calon Keluarga dan Keluarga	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03.0002 - layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03.0003 - layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03.0004 - layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03.0005 - Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03.0006 - Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak		Persentase Pemanfaatan Data Gender dan Anak oleh PD (%)	2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
				Tersusunnya Profil Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	2.08.05.2.01.0004 - Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	
		Meningkatnya Kapasitas dan Kolaborasi antar Lembaga Perlindungan Anak			Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)		
					Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)		
			Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Terlaksananya Sosialisasi Sekolah & Puskesmas Ramah Anak Jumlah Sekolah & Puskesmas	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.06.2.01.0004 - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan	2.08.06.2.01.0006 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Lembaga Perlindungan	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.06.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Laporan)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan	2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Laporan)	2.08.07.2.01.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	2.08.07.2.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	2.08.07.2.01.0010 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan)	2.08.07.2.01.0011 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Layanan dan Pendampingan Korban Kekerasan terhadap Anak	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0011 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0015 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	
					jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.08.07.2.03.0009 - koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.08.07.2.03.0010 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.07.2.03.0011 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.07.2.03.0012 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	
					jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.07.2.03.0014 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

Tabel 4.2 Program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					21.140.654.055,00		25.110.704.866,00		29.870.191.839,00		35.581.205.205,00		42.417.702.747,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.247.494.605,00		11.096.913.526,00		13.316.392.231,00		15.979.670.676,00		19.159.188.811,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	78,15	78,20	78,25	9.247.494.605,00	78,30	11.096.913.526,00	78,35	13.316.392.231,00	78,40	15.979.670.676,00	78,45	19.159.188.811,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					528.000.000,00		631.100.000,00		754.570.000,00		902.459.000,00		1.079.623.300,00	
Meningkatnya Peran TKSK dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase TKSK yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)	100	100	100	528.000.000,00	100	631.100.000,00	100	754.570.000,00	100	902.459.000,00	100	1.079.623.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					4.614.200.000,00		5.337.040.000,00		6.204.448.000,00		7.245.337.600,00		8.494.405.120,00	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS di luar SPM kecuali HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	60	65	70	4.614.200.000,00	75	5.337.040.000,00	80	6.204.448.000,00	85	7.245.337.600,00	90	8.494.405.120,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di	60	65	70		75		80		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Luar Panti (%)													
	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti (%)	60	65	70		75		80		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti (%)	60	65	70		75		80		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti (%)	60	65	70		75		80		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					5.610.960.000,00		6.677.652.000,00		7.953.182.400,00		9.483.818.880,00		11.320.582.656,00	
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	65	70	75	5.610.960.000,00	80	6.677.652.000,00	85	7.953.182.400,00	90	9.483.818.880,00	95	11.320.582.656,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1.049.999.900,00		1.259.999.880,00		1.511.999.856,00		1.814.399.827,00		2.177.279.793,00	
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan	65	70	75	1.049.999.900,00	80	1.259.999.880,00	85	1.511.999.856,00	90	1.814.399.827,00	95	2.177.279.793,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pemulihan Sosial (%)													
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					89.999.550,00		107.999.460,00		129.599.352,00		155.519.222,00		186.623.067,00	
Meningkatnya Pengelolaan TMP	Persentase TMP yang terkelola dengan baik (%)	100	100	100	89.999.550,00	100	107.999.460,00	100	129.599.352,00	100	155.519.222,00	100	186.623.067,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					5.764.788.169,00		6.920.745.803,00		8.295.894.964,00		9.946.073.156,00		11.926.288.747,00	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					958.500.000,00		1.150.200.000,00		1.380.240.000,00		1.656.288.000,00		1.987.545.600,00	
Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG	Persentase ARG (%)	28,3141	28,50	28,75	618.500.000,00	29,00	742.200.000,00	29,40	890.640.000,00	29,70	1.068.768.000,00	30,00	1.282.521.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Peran Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Peran serta Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Ekonomi dan Sosial melalui Pelatihan dan Sosialisasi (%)	0,92	0,59	0,75	340.000.000,00	1,15	408.000.000,00	1,20	489.600.000,00	1,25	587.520.000,00	1,40	705.024.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					689.475.000,00		827.370.000,00		992.844.000,00		1.191.412.000,00		1.429.695.360,00	
Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatakan Layanan Komprehensif (%)	65	70	75	689.475.000,00	80	827.370.000,00	85	992.844.000,00	90	1.191.412.000,00	95	1.429.695.360,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					940.485.030,00		1.128.582.036,00		1.354.298.444,00		1.625.158.132,00		1.950.189.758,00	
Meningkatnya Peran Lembaga dalam Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga yang Aktif dalam Peningkatan Kualitas Keluarga (%)	72,36	73,45	73,60	940.485.030,00	73,80	1.128.582.036,00	74,25	1.354.298.444,00	74,60	1.625.158.132,00	75,10	1.950.189.758,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					45.000.000,00		57.000.000,00		59.400.000,00		62.280.000,00		65.736.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Persentase Pemanfaatan Data Gender dan Anak oleh PD (%)	100	100	100	45.000.000,00	100	57.000.000,00	100	59.400.000,00	100	62.280.000,00	100	65.736.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM					1.554.128.139,00		1.864.953.767,00		2.237.944.520,00		2.685.533.424,00		3.222.640.109,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)														
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	65,57	65,60	65,60	1.554.128.139,00	65,65	1.864.953.767,00	65,70	2.237.944.520,00	65,75	2.685.533.424,00	65,80	3.222.640.109,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					1.577.200.000,00		1.892.640.000,00		2.271.168.000,00		2.725.401.600,00		3.270.481.920,00	
Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	85,32	85,40	85,40	1.577.200.000,00	85,45	1.892.640.000,00	85,50	2.271.168.000,00	85,55	2.725.401.600,00	85,60	3.270.481.920,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
TOTAL KESELURUHAN					26.905.442.224		32.031.450.669		38.166.086.803		45.527.278.361		54.343.991.494	

Tabel 4.3 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				21.140.654.055,00		25.110.704.866,00		29.870.191.839,00		35.581.205.205,00		42.417.702.747,00		
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.247.494.605,00		11.096.913.526,00		13.316.392.231,00		15.979.670.676,00		19.159.188.811,00		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	78,15	78,25	9.247.494.605,00	78,30	11.096.913.526,00	78,35	13.316.392.231,00	78,40	15.979.670.676,00	78,45	19.159.188.811,00	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				125.000.000,00		150.000.000,00		180.000.000,00		216.000.000,00		242.784.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Substansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	7	125.000.000,00	7	150.000.000,00	7	180.000.000,00	7	216.000.000,00	7	242.784.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	4	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1		1		1		1		1			
1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				30.000.000,00		36.000.000,00		43.200.000,00		51.840.000,00		62.208.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	7	30.000.000,00	7	36.000.000,00	7	43.200.000,00	7	51.840.000,00	7	62.208.000,00		
1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				35.000.000,00		42.000.000,00		50.400.000,00		60.480.000,00		66.528.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	35.000.000,00	4	42.000.000,00	4	50.400.000,00	4	60.480.000,00	4	66.528.000,00		
1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000,00		36.000.000,00		43.200.000,00		51.840.000,00		57.024.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	30.000.000,00	4	36.000.000,00	4	43.200.000,00	4	51.840.000,00	4	57.024.000,00		
1.06.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum				30.000.000,00		36.000.000,00		43.200.000,00		51.840.000,00		57.024.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	30.000.000,00	1	36.000.000,00	1	43.200.000,00	1	51.840.000,00	1	57.024.000,00		
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.344.063.000,00		5.212.875.600,00		6.255.450.720,00		7.506.540.864,00		9.007.849.036,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19	24	3.976.394.000,00	24	4.771.672.800,00	24	5.726.007.360,00	24	6.871.208.832,00	24	8.245.450.598,00		
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.976.394.000,00		4.771.672.800,00		5.726.007.360,00		6.871.208.832,00		8.245.450.598,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19	24	3.976.394.000,00	24	4.771.672.800,00	24	5.726.007.360,00	24	6.871.208.832,00	24	8.245.450.598,00		
Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	367.669.000,00	1	441.202.800,00	1	529.443.360,00	1	635.332.032,00	1	762.398.438,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	18	18		18		18		18		18			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)													
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
1.06.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				325.669.000,00		390.802.800,00		468.963.360,00		562.756.032,00		675.307.238,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	325.669.000,00	12	390.802.800,00	12	468.963.360,00	12	562.756.032,00	12	675.307.238,00		
1.06.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				21.000.000,00		25.200.000,00		30.240.000,00		36.288.000,00		43.545.600,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	21.000.000,00	1	25.200.000,00	1	30.240.000,00	1	36.288.000,00	1	43.545.600,00		
1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				21.000.000,00		25.200.000,00		30.240.000,00		36.288.000,00		43.545.600,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	18	18	21.000.000,00	18	25.200.000,00	18	30.240.000,00	18	36.288.000,00	18	43.545.600,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Semesteran SKPD (Laporan)													
1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				189.700.000,00		227.560.000,00		273.168.000,00		327.801.600,00		393.361.920,00		
Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai yang Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3	3	189.700.000,00	3	227.560.000,00	3	273.168.000,00	3	327.801.600,00	3	393.361.920,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	24	24		24		24		24		24			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	20		20		20		20		20			
1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				25.000.000,00		30.000.000,00		36.000.000,00		43.200.000,00		51.840.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	24	24	25.000.000,00	24	30.000.000,00	24	36.000.000,00	24	43.200.000,00	24	51.840.000,00		
1.06.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				30.000.000,00		36.000.000,00		43.200.000,00		51.840.000,00		62.208.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3	3	30.000.000,00	3	36.000.000,00	3	43.200.000,00	3	51.840.000,00	3	62.208.000,00		
1.06.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				114.900.000,00		137.800.000,00		165.456.000,00		198.547.200,00		238.256.640,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	2	2	114.900.000,00	2	137.800.000,00	2	165.456.000,00	2	198.547.200,00	2	238.256.640,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)													
1.06.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				19.800.000,00		23.760.000,00		28.512.000,00		34.214.400,00		41.057.280,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	20	19.800.000,00	20	23.760.000,00	20	28.512.000,00	20	34.214.400,00	20	41.057.280,00		
1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				356.779.375,00		428.135.250,00		513.762.300,00		616.514.759,00		739.817.711,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran Yang Layak Pakai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	233.021.725,00	12	279.626.070,00	12	335.551.284,00	12	402.661.540,00	12	483.193.848,00		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.497.425,00		8.996.910,00		10.796.292,00		12.955.550,00		15.546.660,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	7.497.425,00	12	8.996.910,00	12	10.796.292,00	12	12.955.550,00	12	15.546.660,00		
1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				195.444.300,00		234.533.160,00		281.439.792,00		337.727.750,00		405.273.300,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	195.444.300,00	12	234.533.160,00	12	281.439.792,00	12	337.727.750,00	12	405.273.300,00		
1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.080.000,00		36.096.000,00		43.315.200,00		51.978.240,00		62.373.888,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	30.080.000,00	12	36.096.000,00	12	43.315.200,00	12	51.978.240,00	12	62.373.888,00		
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	123.757.650,00	12	148.509.180,00	12	178.211.016,00	12	213.853.219,00	12	256.623.863,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.000.000,00		3.600.000,00		4.320.000,00		5.184.000,00		6.220.800,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	3.000.000,00	12	3.600.000,00	12	4.320.000,00	12	5.184.000,00	12	6.220.800,00		
1.06.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				44.701.350,00		53.641.620,00		64.369.944,00		77.243.933,00		92.692.719,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	44.701.350,00	12	53.641.620,00	12	64.369.944,00	12	77.243.933,00	12	92.692.719,00		
1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46.056.300,00		55.267.560,00		66.321.072,00		79.585.286,00		95.502.344,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	46.056.300,00	12	55.267.560,00	12	66.321.072,00	12	79.585.286,00	12	95.502.344,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				30.000.000,00		36.000.000,00		43.200.000,00		51.840.000,00		62.208.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	12	30.000.000,00	12	36.000.000,00	12	43.200.000,00	12	51.840.000,00	12	62.208.000,00		
1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.542.937.380,00		3.051.524.856,00		3.661.829.827,00		4.394.195.792,00		5.273.034.951,00		
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	46	26	2.542.937.380,00	26	3.051.524.856,00	26	3.661.829.827,00	26	4.394.195.792,00	26	5.273.034.951,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	36	67		67		67		67		67			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	10		10		10		10		10			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5		5		5		5		5			
1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				222.937.650,00		267.525.180,00		321.030.216,00		385.236.259,00		462.283.511,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	36	67	222.937.650,00	67	267.525.180,00	67	321.030.216,00	67	385.236.259,00	67	462.283.511,00		
1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				244.999.730,00		293.999.676,00		352.799.611,00		423.359.533,00		508.031.440,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	46	26	244.999.730,00	26	293.999.676,00	26	352.799.611,00	26	423.359.533,00	26	508.031.440,00		
1.06.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung				2.000.000.000,00		2.400.000.000,00		2.880.000.000,00		3.456.000.000,00		4.147.200.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	2.000.000.000,00	1	2.400.000.000,00	1	2.880.000.000,00	1	3.456.000.000,00	1	4.147.200.000,00		
1.06.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		60.000.000,00		72.000.000,00		86.400.000,00		103.680.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	10	50.000.000,00	10	60.000.000,00	10	72.000.000,00	10	86.400.000,00	10	103.680.000,00		
1.06.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000,00		30.000.000,00		36.000.000,00		43.200.000,00		51.840.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5	25.000.000,00	5	30.000.000,00	5	36.000.000,00	5	43.200.000,00	5	51.840.000,00		
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.108.692.500,00		1.330.431.000,00		1.596.517.200,00		1.915.820.640,00		2.298.984.768,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran Yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.108.692.500,00	12	1.330.431.000,00	12	1.596.517.200,00	12	1.915.820.640,00	12	2.298.984.768,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36		36		36		36		36			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.991.250,00		2.389.500,00		2.867.400,00		3.440.880,00		4.129.056,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	4	1.991.250,00	4	2.389.500,00	4	2.867.400,00	4	3.440.880,00	4	4.129.056,00		
1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				288.000.000,00		345.600.000,00		414.720.000,00		497.664.000,00		597.196.800,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	288.000.000,00	36	345.600.000,00	36	414.720.000,00	36	497.664.000,00	36	597.196.800,00		
1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				818.701.250,00		982.441.500,00		1.178.929.800,00		1.414.715.760,00		1.697.658.912,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	818.701.250,00	12	982.441.500,00	12	1.178.929.800,00	12	1.414.715.760,00	12	1.697.658.912,00		
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				580.322.350,00		696.386.820,00		835.664.184,00		1.002.797.021,00		1.203.356.425,00		
Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	31	67	580.322.350,00	67	696.386.820,00	67	835.664.184,00	67	1.002.797.021,00	67	1.203.356.425,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	6		6		6		6		6			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3	50		50		50		50		50			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	74		74		74		74		74			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5		5		5		5		5			
1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				391.361.750,00		469.634.100,00		563.560.920,00		676.273.104,00		811.527.725,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	31	67	391.361.750,00	67	469.634.100,00	67	563.560.920,00	67	676.273.104,00	67	811.527.725,00		
1.06.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				20.000.000,00		24.000.000,00		28.800.000,00		34.560.000,00		41.472.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3	50	20.000.000,00	50	24.000.000,00	50	28.800.000,00	50	34.560.000,00	50	41.472.000,00		
1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.700.000,00		35.640.000,00		42.768.000,00		51.321.600,00		61.585.920,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	74	29.700.000,00	74	35.640.000,00	74	42.768.000,00	74	51.321.600,00	74	61.585.920,00		
1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabili				114.260.600,00		137.112.720,00		164.535.264,00		197.442.317,00		236.930.780,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	6	114.260.600,00	6	137.112.720,00	6	164.535.264,00	6	197.442.317,00	6	236.930.780,00		
1.06.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000,00		24.000.000,00		28.800.000,00		34.560.000,00		41.472.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	10	20.000.000,00	10	24.000.000,00	10	28.800.000,00	10	34.560.000,00	10	41.472.000,00		
1.06.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000,00		6.000.000,00		7.200.000,00		8.640.000,00		10.368.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	5.000.000,00	5	6.000.000,00	5	7.200.000,00	5	8.640.000,00	5	10.368.000,00		
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				528.000.000,00		631.100.000,00		754.570.000,00		902.459.000,00		1.079.623.300,00		
Meningkatnya Peran TKSK dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase TKSK yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)	100	100	528.000.000,00	100	631.100.000,00	100	754.570.000,00	100	902.459.000,00	100	1.079.623.300,00	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam				18.000.000,00		21.600.000,00		25.920.000,00		31.104.000,00		37.324.800,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Daerah Kabupaten/Kota														
Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin UGB dan PUB sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)		1	18.000.000,00	1	21.600.000,00	1	25.920.000,00	1	31.104.000,00	1	37.324.800,00		
1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				18.000.000,00		21.600.000,00		25.920.000,00		31.104.000,00		37.324.800,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)		1	18.000.000,00	1	21.600.000,00	1	25.920.000,00	1	31.104.000,00	1	37.324.800,00		
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				510.000.000,00		609.500.000,00		728.650.000,00		871.355.000,00		1.042.298.500,00		
Terlaksananya Pengembangan Potensi TKSK	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	25	25	510.000.000,00	25	609.500.000,00	25	728.650.000,00	25	871.355.000,00	25	1.042.298.500,00		
	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	80	101		101		101		101		101			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (Orang)		500		500		500		500		500			
	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial (Orang)	150	150		150		150		150		150			
1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				25.000.000,00		30.000.000,00		36.000.000,00		43.200.000,00		51.840.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Keluarga	Jumlah Keluarga yang Meningkat	25	25	25.000.000,00	25	30.000.000,00	25	36.000.000,00	25	43.200.000,00	25	51.840.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Kewenangan Kabupaten/Kota	Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)													
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000,00		60.000.000,00		72.000.000,00		86.400.000,00		103.680.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	80	101	50.000.000,00	101	60.000.000,00	101	72.000.000,00	101	86.400.000,00	101	103.680.000,00		
1.06.02.2.03.0010 - Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan				60.000.000,00		72.000.000,00		86.400.000,00		103.680.000,00		124.416.000,00		
Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial (Orang)	150	150	60.000.000,00	150	72.000.000,00	150	86.400.000,00	150	103.680.000,00	150	124.416.000,00		
1.06.02.2.03.0011 - Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial				50.000.000,00		60.000.000,00		72.000.000,00		86.400.000,00		103.680.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (Orang)		500	50.000.000,00	500	60.000.000,00	500	72.000.000,00	500	86.400.000,00	500	103.680.000,00		
1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota				300.000.000,00		360.000.000,00		432.000.000,00		518.400.000,00		622.080.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	20	20	300.000.000,00	20	360.000.000,00	20	432.000.000,00	20	518.400.000,00	20	622.080.000,00		
1.06.02.2.03.0015 - Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi				25.000.000,00		27.500.000,00		30.250.000,00		33.275.000,00		36.602.500,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang)	25	25	25.000.000,00	25	27.500.000,00	25	30.250.000,00	25	33.275.000,00	25	36.602.500,00		
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				4.614.200.000,00		5.337.040.000,00		6.204.448.000,00		7.245.337.600,00		8.494.405.120,00		
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Anak	60	70	4.614.200.000,00	75	5.337.040.000,00	80	6.204.448.000,00	85	7.245.337.600,00	90	8.494.405.120,00	1.06.2.08.0.00.01.0000 -	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Telantar di Luar Panti (%)												Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Persentase PPKS di luar SPM kecuali HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	60	70		75		80		85		90			
	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti (%)	60	70		75		80		85		90			
	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti (%)	60	70		75		80		85		90			
	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti (%)	60	70		75		80		85		90			
1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				1.426.000.000,00		1.711.200.000,00		2.053.440.000,00		2.464.128.000,00		2.956.953.600,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PPKS sesuai dengan SPM	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan	351	435	1.426.000.000,00	435	1.711.200.000,00	435	2.053.440.000,00	435	2.464.128.000,00	435	2.956.953.600,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kabupaten/Kota (Orang)													
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	48	25		25		25		25		25			
	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50		50		50		50					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan	140	140		140		140		140		140			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)													
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	140	140		140		140		140		140			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250	250		250		250		250		250			
	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (Orang)	100	100		100		100		100					
	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	115	115		115		115		115		115			
	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang	20	20		20		20		20		20			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)													
	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Orang)	75	75		75		75		75		75			
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	66	130		130		130		130		130			
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan				75.000.000,00		90.000.000,00		108.000.000,00		129.600.000,00		155.520.000,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250	250	75.000.000,00	250	90.000.000,00	250	108.000.000,00	250	129.600.000,00	250	155.520.000,00		
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				12.500.000,00		15.000.000,00		18.000.000,00		21.600.000,00		25.920.000,00		
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	115	115	12.500.000,00	115	15.000.000,00	115	18.000.000,00	115	21.600.000,00	115	25.920.000,00		
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu				15.000.000,00		18.000.000,00		21.600.000,00		25.920.000,00		31.104.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	15.000.000,00	25	18.000.000,00	25	21.600.000,00	25	25.920.000,00	25	31.104.000,00		
1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				15.000.000,00		18.000.000,00		21.600.000,00		25.920.000,00		31.104.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	140	140	15.000.000,00	140	18.000.000,00	140	21.600.000,00	140	25.920.000,00	140	31.104.000,00		
1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				35.000.000,00		42.000.000,00		50.400.000,00		60.480.000,00		72.576.000,00		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	66	130	35.000.000,00	130	42.000.000,00	130	50.400.000,00	130	60.480.000,00	130	72.576.000,00		
1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				893.500.000,00		1.072.200.000,00		1.286.640.000,00		1.543.968.000,00		1.852.761.600,00		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan	351	435	893.500.000,00	435	1.072.200.000,00	435	1.286.640.000,00	435	1.543.968.000,00	435	1.852.761.600,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)													
1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				10.000.000,00		12.000.000,00		14.400.000,00		17.280.000,00		20.736.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	10.000.000,00	25	12.000.000,00	25	14.400.000,00	25	17.280.000,00	25	20.736.000,00		
1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				10.000.000,00		12.000.000,00		14.400.000,00		17.280.000,00		20.736.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	10.000.000,00	25	12.000.000,00	25	14.400.000,00	25	17.280.000,00	25	20.736.000,00		
1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan				25.000.000,00		30.000.000,00		36.000.000,00		43.200.000,00		51.840.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	48	25	25.000.000,00	25	30.000.000,00	25	36.000.000,00	25	43.200.000,00	25	51.840.000,00		
1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				15.000.000,00		18.000.000,00		21.600.000,00		25.920.000,00		31.104.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	140	140	15.000.000,00	140	18.000.000,00	140	21.600.000,00	140	25.920.000,00	140	31.104.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan				25.000.000,00		30.000.000,00		36.000.000,00		43.200.000,00		51.840.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	25.000.000,00	25	30.000.000,00	25	36.000.000,00	25	43.200.000,00	25	51.840.000,00		
1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota				20.000.000,00		24.000.000,00		28.800.000,00		34.560.000,00		41.472.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	20	20.000.000,00	20	24.000.000,00	20	28.800.000,00	20	34.560.000,00	20	41.472.000,00		
1.06.04.2.01.0015 - Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis				150.000.000,00		180.000.000,00		216.000.000,00		259.200.000,00		311.040.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan	75	75	150.000.000,00	75	180.000.000,00	75	216.000.000,00	75	259.200.000,00	75	311.040.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Orang)													
1.06.04.2.01.0016 - Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)				35.000.000,00		42.000.000,00		50.400.000,00		60.480.000,00		72.576.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	35.000.000,00	50	42.000.000,00	50	50.400.000,00	50	60.480.000,00		72.576.000,00		
1.06.04.2.01.0017 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan				15.000.000,00		18.000.000,00		21.600.000,00		25.920.000,00		31.104.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	15.000.000,00	25	18.000.000,00	25	21.600.000,00	25	25.920.000,00	25	31.104.000,00		
1.06.04.2.01.0018 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial				75.000.000,00		90.000.000,00		108.000.000,00		129.600.000,00		155.520.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (Orang)	100	100	75.000.000,00	100	90.000.000,00	100	108.000.000,00	100	129.600.000,00		155.520.000,00		
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan				3.188.200.000,00		3.625.840.000,00		4.151.008.000,00		4.781.209.600,00		5.537.451.520,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
NAPZA di Luar Panti Sosial														
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PPKS di luar SPM kecuali HIV/ AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	103	95	3.188.200.000,00	95	3.625.840.000,00	95	4.151.008.000,00	95	4.781.209.600,00	95	5.537.451.520,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	22	22		22		22		22		22			
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25		25		25		25		25			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	175	175		175		175		175		175			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	18	24		24		24		24		24			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan	730	3.320		3.320		3.320		3.320		3.320			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)													
	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Aduan)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	35	35		35		35		35		35			
	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial	50	50		50		50		50		50			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya (Orang)													
1.06.04.2.02.0001 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				25.000.000,00		30.000.000,00		36.000.000,00		43.200.000,00		51.840.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	25.000.000,00	25	30.000.000,00	25	36.000.000,00	25	43.200.000,00	25	51.840.000,00		
1.06.04.2.02.0002 - Pemberian Layanan Kedaruratan				20.000.000,00		24.000.000,00		28.800.000,00		34.560.000,00		41.472.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	20.000.000,00	15	24.000.000,00	15	28.800.000,00	15	34.560.000,00	15	41.472.000,00		
1.06.04.2.02.0003 - Penyediaan Permakanan				538.200.000,00		645.840.000,00		775.008.000,00		930.009.600,00		1.116.011.520,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	730	3.320	538.200.000,00	3.320	645.840.000,00	3.320	775.008.000,00	3.320	930.009.600,00	3.320	1.116.011.520,00		
1.06.04.2.02.0004 - Penyediaan Sandang				25.000.000,00		30.000.000,00		36.000.000,00		43.200.000,00		51.840.000,00		
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	25.000.000,00	25	30.000.000,00	25	36.000.000,00	25	43.200.000,00	25	51.840.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.06.04.2.02.0005 - Penyediaan Alat Bantu				30.000.000,00		36.000.000,00		43.200.000,00		51.840.000,00		62.208.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	175	175	30.000.000,00	175	36.000.000,00	175	43.200.000,00	175	51.840.000,00	175	62.208.000,00		
1.06.04.2.02.0006 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti				10.000.000,00		12.000.000,00		14.400.000,00		17.280.000,00		20.736.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	10.000.000,00	25	12.000.000,00	25	14.400.000,00	25	17.280.000,00	25	20.736.000,00		
1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				400.000.000,00		480.000.000,00		576.000.000,00		691.200.000,00		829.440.000,00		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	103	95	400.000.000,00	95	480.000.000,00	95	576.000.000,00	95	691.200.000,00	95	829.440.000,00		
1.06.04.2.02.0008 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA				50.000.000,00		60.000.000,00		72.000.000,00		86.400.000,00		103.680.000,00		
Terlakasananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah	35	35	50.000.000,00	35	60.000.000,00	35	72.000.000,00	35	86.400.000,00	35	103.680.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)													
1.06.04.2.02.0009 - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak				10.000.000,00		12.000.000,00		14.400.000,00		17.280.000,00		20.736.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	10.000.000,00	25	12.000.000,00	25	14.400.000,00	25	17.280.000,00	25	20.736.000,00		
1.06.04.2.02.0010 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				10.000.000,00		12.000.000,00		14.400.000,00		17.280.000,00		20.736.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	10.000.000,00	25	12.000.000,00	25	14.400.000,00	25	17.280.000,00	25	20.736.000,00		
1.06.04.2.02.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				5.000.000,00		6.000.000,00		7.200.000,00		8.640.000,00		10.368.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	25	25	5.000.000,00	25	6.000.000,00	25	7.200.000,00	25	8.640.000,00	25	10.368.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)													
1.06.04.2.02.0012 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				10.000.000,00		12.000.000,00		14.400.000,00		17.280.000,00		20.736.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	18	24	10.000.000,00	24	12.000.000,00	24	14.400.000,00	24	17.280.000,00	24	20.736.000,00		
1.06.04.2.02.0013 - Pemberian Layanan Rujukan				5.000.000,00		6.000.000,00		7.200.000,00		8.640.000,00		10.368.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	5.000.000,00	25	6.000.000,00	25	7.200.000,00	25	8.640.000,00	25	10.368.000,00		
1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				1.775.000.000,00		1.930.000.000,00		2.116.000.000,00		2.339.200.000,00		2.607.040.000,00		
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	22	22	1.775.000.000,00	22	1.930.000.000,00	22	2.116.000.000,00	22	2.339.200.000,00	22	2.607.040.000,00		
1.06.04.2.02.0015 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS)				75.000.000,00		90.000.000,00		108.000.000,00		129.600.000,00		155.520.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30	30	75.000.000,00	30	90.000.000,00	30	108.000.000,00	30	129.600.000,00	30	155.520.000,00		
1.06.04.2.02.0016 - Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya				50.000.000,00		60.000.000,00		72.000.000,00		86.400.000,00		103.680.000,00		
Terlaksananya pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya (Orang)	50	50	50.000.000,00	50	60.000.000,00	50	72.000.000,00	50	86.400.000,00	50	103.680.000,00		
1.06.04.2.02.0017 - Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya				150.000.000,00		180.000.000,00		216.000.000,00		259.200.000,00		311.040.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional	25	25	150.000.000,00	25	180.000.000,00	25	216.000.000,00	25	259.200.000,00	25	311.040.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	untuk Kemandirian Ekonomi (Aduan)													
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				5.610.960.000,00		6.677.652.000,00		7.953.182.400,00		9.483.818.880,00		11.320.582.656,00		
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	65	75	5.610.960.000,00	80	6.677.652.000,00	85	7.953.182.400,00	90	9.483.818.880,00	95	11.320.582.656,00	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				20.000.000,00		28.500.000,00		34.200.000,00		41.040.000,00		49.248.000,00		
Terlaksananya Pembinaan bagi Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	10	20.000.000,00	15	28.500.000,00	20	34.200.000,00	20	41.040.000,00	20	49.248.000,00		
	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	10		15		15		15		20			
	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	10		15		15		20		20			
	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi (Orang)	10	10		15		15		20		20			
1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar				5.000.000,00		7.500.000,00		9.000.000,00		10.800.000,00		12.960.000,00		
Terlaksananya Penjangkauan Anak-	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang	10	10	5.000.000,00	15	7.500.000,00	15	9.000.000,00	15	10.800.000,00	20	12.960.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)													
1.06.05.2.01.0002 - Rujukan Anak-Anak Terlantar				5.000.000,00		7.500.000,00		9.000.000,00		10.800.000,00		12.960.000,00		
Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	10	5.000.000,00	15	7.500.000,00	20	9.000.000,00	20	10.800.000,00	20	12.960.000,00		
1.06.05.2.01.0003 - Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar				5.000.000,00		7.500.000,00		9.000.000,00		10.800.000,00		12.960.000,00		
Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	10	5.000.000,00	15	7.500.000,00	15	9.000.000,00	20	10.800.000,00	20	12.960.000,00		
1.06.05.2.01.0004 - Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi				5.000.000,00		6.000.000,00		7.200.000,00		8.640.000,00		10.368.000,00		
Terfasilitasinya Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi (Orang)	10	10	5.000.000,00	15	6.000.000,00	15	7.200.000,00	20	8.640.000,00	20	10.368.000,00		
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				5.590.960.000,00		6.649.152.000,00		7.918.982.400,00		9.442.778.880,00		11.271.334.656,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi Fakir Miskin Penerima Manfaat	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan	7.891	7.891	5.590.960.000,00	7.891	6.649.152.000,00	7.891	7.918.982.400,00	7.891	9.442.778.880,00	7.891	11.271.334.656,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pendampingan usaha Lintas Daerah (Orang)													
	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	10.000	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000			
	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	16	16		18		19				23			
	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10.000	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000			
	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	4.422	3.997		3.997		3.997		3.997		3.997			
	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	214.620	186.804		186.804		186.804		186.804		186.804			
1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000,00		30.000.000,00		36.000.000,00		43.200.000,00		51.840.000,00		
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	10.000	10.000	25.000.000,00	10.000	30.000.000,00	10.000	36.000.000,00	10.000	43.200.000,00	10.000	51.840.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				50.000.000,00		60.000.000,00		72.000.000,00		86.400.000,00		103.680.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	16	16	50.000.000,00	18	60.000.000,00	19	72.000.000,00		86.400.000,00	23	103.680.000,00		
1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				5.015.960.000,00		5.959.152.000,00		7.090.982.400,00		8.449.178.880,00		10.079.014.656,00		
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	4.422	3.997	5.015.960.000,00	3.997	5.959.152.000,00	3.997	7.090.982.400,00	3.997	8.449.178.880,00	3.997	10.079.014.656,00		
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				350.000.000,00		420.000.000,00		504.000.000,00		604.800.000,00		725.760.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	214.620	186.804	350.000.000,00	186.804	420.000.000,00	186.804	504.000.000,00	186.804	604.800.000,00	186.804	725.760.000,00		
1.06.05.2.02.0009 - Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin				50.000.000,00		60.000.000,00		72.000.000,00		86.400.000,00		103.680.000,00		
Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan	10.000	10.000	50.000.000,00	10.000	60.000.000,00	10.000	72.000.000,00	10.000	86.400.000,00	10.000	103.680.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Kabupaten/Kota (Orang)													
1.06.05.2.02.0010 - Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota				100.000.000,00		120.000.000,00		144.000.000,00		172.800.000,00		207.360.000,00		
Terlaksananya fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah (Orang)	7.891	7.891	100.000.000,00	7.891	120.000.000,00	7.891	144.000.000,00	7.891	172.800.000,00	7.891	207.360.000,00		
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				1.049.999.900,00		1.259.999.880,00		1.511.999.856,00		1.814.399.827,00		2.177.279.793,00		
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	65	75	1.049.999.900,00	80	1.259.999.880,00	85	1.511.999.856,00	90	1.814.399.827,00	95	2.177.279.793,00	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				115.000.000,00		138.000.000,00		165.600.000,00		198.720.000,00		238.464.000,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bancana Alam dan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	375	350	90.000.000,00	350	108.000.000,00	400	129.600.000,00	425	155.520.000,00	450	186.624.000,00		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan	50	50		50		50		50		50			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kabupaten/Kota (Orang)													
	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	5		5		5		5		5			
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan				70.000.000,00		84.000.000,00		100.800.000,00		120.960.000,00		145.152.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	375	350	70.000.000,00	350	84.000.000,00	400	100.800.000,00	425	120.960.000,00	450	145.152.000,00		
1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				10.000.000,00		12.000.000,00		14.400.000,00		17.280.000,00		20.736.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	10.000.000,00	50	12.000.000,00	50	14.400.000,00	50	17.280.000,00	50	20.736.000,00		
1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				10.000.000,00		12.000.000,00		14.400.000,00		17.280.000,00		20.736.000,00		
Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	5	10.000.000,00	5	12.000.000,00	5	14.400.000,00	5	17.280.000,00	5	20.736.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	15.000.000,00	50	18.000.000,00	50	21.600.000,00	50	25.920.000,00	50	31.104.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				15.000.000,00		18.000.000,00		21.600.000,00		25.920.000,00		31.104.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	15.000.000,00	50	18.000.000,00	50	21.600.000,00	50	25.920.000,00	50	31.104.000,00		
Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	20	10.000.000,00	20	12.000.000,00	20	14.400.000,00	20	17.280.000,00		20.736.000,00		
1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial				10.000.000,00		12.000.000,00		14.400.000,00		17.280.000,00		20.736.000,00		
Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	20	10.000.000,00	20	12.000.000,00	20	14.400.000,00	20	17.280.000,00		20.736.000,00		
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				934.999.900,00		1.121.999.880,00		1.346.399.856,00		1.615.679.827,00		1.938.815.793,00		
Terlaksananya Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi (Orang)	35	35	934.999.900,00	35	1.121.999.880,00	35	1.346.399.856,00	35	1.615.679.827,00	35	1.938.815.793,00		
	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	18	18		18		18		18		18			
	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial	75	75		75		75		75		75			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan (Orang)													
	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai (Keluarga)	150	150		150		150		150		150			
	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi (Desa/Kelurahan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana (Orang)	50	50		50		50		50		50			
1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				30.000.000,00		36.000.000,00		43.200.000,00		51.840.000,00		62.208.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	2	2	30.000.000,00	2	36.000.000,00	2	43.200.000,00	2	51.840.000,00	2	62.208.000,00		
1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				399.999.900,00		479.999.880,00		575.999.856,00		691.199.827,00		829.439.793,00		
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	399.999.900,00	15	479.999.880,00	15	575.999.856,00	15	691.199.827,00	15	829.439.793,00		
1.06.06.2.02.0003 - Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda				40.000.000,00		48.000.000,00		57.600.000,00		69.120.000,00		82.944.000,00		
Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	18	18	40.000.000,00	18	48.000.000,00	18	57.600.000,00	18	69.120.000,00	18	82.944.000,00		
1.06.06.2.02.0005 - Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana				50.000.000,00		60.000.000,00		72.000.000,00		86.400.000,00		103.680.000,00		
Terfasilitasinya Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi (Desa/Kelurahan)	3	3	50.000.000,00	3	60.000.000,00	3	72.000.000,00	3	86.400.000,00	3	103.680.000,00		
1.06.06.2.02.0006 - Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana				40.000.000,00		48.000.000,00		57.600.000,00		69.120.000,00		82.944.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
(Tagana) Dalam Penanganan Bencana														
Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi (Orang)	35	35	40.000.000,00	35	48.000.000,00	35	57.600.000,00	35	69.120.000,00	35	82.944.000,00		
1.06.06.2.02.0007 - Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana				200.000.000,00		240.000.000,00		288.000.000,00		345.600.000,00		414.720.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai (Keluarga)	150	150	200.000.000,00	150	240.000.000,00	150	288.000.000,00	150	345.600.000,00	150	414.720.000,00		
1.06.06.2.02.0008 - Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah				75.000.000,00		90.000.000,00		108.000.000,00		129.600.000,00		155.520.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana (Orang)	50	50	75.000.000,00	50	90.000.000,00	50	108.000.000,00	50	129.600.000,00	50	155.520.000,00		
1.06.06.2.02.0011 - Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana				100.000.000,00		120.000.000,00		144.000.000,00		172.800.000,00		207.360.000,00		
Terlaksananya penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	75	75	100.000.000,00	75	120.000.000,00	75	144.000.000,00	75	172.800.000,00	75	207.360.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan (Orang)													
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				89.999.550,00		107.999.460,00		129.599.352,00		155.519.222,00		186.623.067,00		
Meningkatnya Pengelolaan TMP	Persentase TMP yang terkelola dengan baik (%)	100	100	89.999.550,00	100	107.999.460,00	100	129.599.352,00	100	155.519.222,00	100	186.623.067,00	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				89.999.550,00		107.999.460,00		129.599.352,00		155.519.222,00		186.623.067,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Makam Pahlawan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	560	562	89.999.550,00	562	107.999.460,00	562	129.599.352,00	562	155.519.222,00	562	186.623.067,00		
	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Orang)	60	60		60		60		60		60			
	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Orang)	2	2		2		2		2		2			
1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				74.999.550,00		89.999.460,00		107.999.352,00		129.599.222,00		155.519.067,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	560	562	74.999.550,00	562	89.999.460,00	562	107.999.352,00	562	129.599.222,00	562	155.519.067,00		
1.06.07.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				5.000.000,00		6.000.000,00		7.200.000,00		8.640.000,00		10.368.000,00		
Terlaksananya pemberian pelayanan pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Orang)	2	2	5.000.000,00	2	6.000.000,00	2	7.200.000,00	2	8.640.000,00	2	10.368.000,00		
1.06.07.2.01.0005 - Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				10.000.000,00		12.000.000,00		14.400.000,00		17.280.000,00		20.736.000,00		
Terlaksananya Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Orang)	60	60	10.000.000,00	60	12.000.000,00	60	14.400.000,00	60	17.280.000,00	60	20.736.000,00		
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				5.764.788.169,00		6.920.745.803,00		8.295.894.964,00		9.946.073.156,00		11.926.288.747,00		
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				958.500.000,00		1.150.200.000,00		1.380.240.000,00		1.656.288.000,00		1.987.545.600,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG	Persentase ARG (%)	28,3141	28,75	618.500.000,00	29,00	742.200.000,00	29,40	890.640.000,00	29,70	1.068.768.000,00	30,00	1.282.521.600,00	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				325.000.000,00		390.000.000,00		468.000.000,00		561.600.000,00		673.920.000,00		
Terlaksananya PD yang Memiliki PPRG	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	52	52	325.000.000,00	52	390.000.000,00	52	468.000.000,00	52	561.600.000,00	52	673.920.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	penyelenggaraan PUG (Laporan)													
	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	52	52		52		52		52		52			
	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	52	52		52		52		52		52			
2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG				55.000.000,00		66.000.000,00		79.200.000,00		95.040.000,00		114.048.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	55.000.000,00	1	66.000.000,00	1	79.200.000,00	1	95.040.000,00	1	114.048.000,00		
2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				30.000.000,00		36.000.000,00		43.200.000,00		51.840.000,00		62.208.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	1	1	30.000.000,00	1	36.000.000,00	1	43.200.000,00	1	51.840.000,00	1	62.208.000,00		
2.08.02.2.01.0010 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				110.000.000,00		132.000.000,00		158.400.000,00		190.080.000,00		228.096.000,00		
Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	1	1	110.000.000,00	1	132.000.000,00	1	158.400.000,00	1	190.080.000,00	1	228.096.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				30.000.000,00		36.000.000,00		43.200.000,00		51.840.000,00		62.208.000,00		
terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	52	52	30.000.000,00	52	36.000.000,00	52	43.200.000,00	52	51.840.000,00	52	62.208.000,00		
2.08.02.2.01.0012 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota				15.000.000,00		18.000.000,00		21.600.000,00		25.920.000,00		31.104.000,00		
terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	15.000.000,00	1	18.000.000,00	1	21.600.000,00	1	25.920.000,00	1	31.104.000,00		
2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota				35.000.000,00		42.000.000,00		50.400.000,00		60.480.000,00		72.576.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	52	52	35.000.000,00	52	42.000.000,00	52	50.400.000,00	52	60.480.000,00	52	72.576.000,00		
2.08.02.2.01.0014 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000,00		60.000.000,00		72.000.000,00		86.400.000,00		103.680.000,00		
terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	52	52	50.000.000,00	52	60.000.000,00	52	72.000.000,00	52	86.400.000,00	52	103.680.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				293.500.000,00		352.200.000,00		422.640.000,00		507.168.000,00		608.601.600,00		
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Pelayanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	1	1	293.500.000,00	1	352.200.000,00	1	422.640.000,00	1	507.168.000,00	1	608.601.600,00		
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	1	1		1		1		1		1			
	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	12	43		43		43		43		43			
2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				263.500.000,00		316.200.000,00		379.440.000,00		455.328.000,00		546.393.600,00		
terlaksananya pendampingan penguatan dan	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan	12	43	263.500.000,00	43	316.200.000,00	43	379.440.000,00	43	455.328.000,00	43	546.393.600,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)													
2.08.02.2.03.0008 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				10.000.000,00		12.000.000,00		14.400.000,00		17.280.000,00		20.736.000,00		
terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	14.400.000,00	1	17.280.000,00	1	20.736.000,00		
2.08.02.2.03.0009 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				20.000.000,00		24.000.000,00		28.800.000,00		34.560.000,00		41.472.000,00		
terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	1	1	20.000.000,00	1	24.000.000,00	1	28.800.000,00	1	34.560.000,00	1	41.472.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Peran Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Peran serta Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Ekonomi dan Sosial melalui Pelatihan dan Sosialisasi (%)	0,92	0,75	340.000.000,00	1,15	408.000.000,00	1,20	489.600.000,00	1,25	587.520.000,00	1,40	705.024.000,00		
2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				340.000.000,00		408.000.000,00		489.600.000,00		587.520.000,00		705.024.000,00		
Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM bagi Perempuan	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	33	33	340.000.000,00	33	408.000.000,00	33	489.600.000,00	33	587.520.000,00	33	705.024.000,00		
	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	50	50		50		50		50		50			
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	40	1		1		1		1		1			
	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	33	33		33		33		33		33			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	50	50		50		50		50		50			
	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	50	50		50		50		50		50			
2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				55.000.000,00		66.000.000,00		79.200.000,00		95.040.000,00		114.048.000,00		
Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	50	50	55.000.000,00	50	66.000.000,00	50	79.200.000,00	50	95.040.000,00	50	114.048.000,00		
2.08.02.2.02.0005 - Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				35.000.000,00		42.000.000,00		50.400.000,00		60.480.000,00		72.576.000,00		
Terlaksananya Advokasi	Jumlah lembaga masyarakat dan	33	33	35.000.000,00	33	42.000.000,00	33	50.400.000,00	33	60.480.000,00	33	72.576.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga)													
2.08.02.2.02.0006 - Pendampinganlembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				35.000.000,00		42.000.000,00		50.400.000,00		60.480.000,00		72.576.000,00		
Terlaksananya pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	33	33	35.000.000,00	33	42.000.000,00	33	50.400.000,00	33	60.480.000,00	33	72.576.000,00		
2.08.02.2.02.0007 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				15.000.000,00		18.000.000,00		21.600.000,00		25.920.000,00		31.104.000,00		
Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	40	1	15.000.000,00	1	18.000.000,00	1	21.600.000,00	1	25.920.000,00	1	31.104.000,00		
2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan				80.000.000,00		96.000.000,00		115.200.000,00		138.240.000,00		165.888.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota														
Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	50	50	80.000.000,00	50	96.000.000,00	50	115.200.000,00	50	138.240.000,00	50	165.888.000,00		
2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				120.000.000,00		144.000.000,00		172.800.000,00		207.360.000,00		248.832.000,00		
Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	50	50	120.000.000,00	50	144.000.000,00	50	172.800.000,00	50	207.360.000,00	50	248.832.000,00		
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				689.475.000,00		827.370.000,00		992.844.000,00		1.191.412.000,00		1.429.695.360,00		
Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	65	75	689.475.000,00	80	827.370.000,00	85	992.844.000,00	90	1.191.412.000,00	95	1.429.695.360,00	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				265.000.000,00		318.000.000,00		381.600.000,00		457.920.000,00		549.504.000,00		
Terlaksananya Layanan dan Pendampingan Korban Kekerasan	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan	1	1	265.000.000,00	1	318.000.000,00	1	381.600.000,00	1	457.920.000,00	1	549.504.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kabupaten/Kota (Dokumen)													
	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	3	3		3		3		3		3			
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan)	2	2		2		2		2		2			
2.08.03.2.01.0003 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				55.000.000,00		66.000.000,00		79.200.000,00		95.040.000,00		114.048.000,00		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	1	1	55.000.000,00	1	66.000.000,00	1	79.200.000,00	1	95.040.000,00	1	114.048.000,00		
2.08.03.2.01.0004 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				55.000.000,00		66.000.000,00		79.200.000,00		95.040.000,00		114.048.000,00		
Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	55.000.000,00	1	66.000.000,00	1	79.200.000,00	1	95.040.000,00	1	114.048.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				100.000.000,00		120.000.000,00		144.000.000,00		172.800.000,00		207.360.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	3	3	100.000.000,00	3	120.000.000,00	3	144.000.000,00	3	172.800.000,00	3	207.360.000,00		
2.08.03.2.01.0007 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota				55.000.000,00		66.000.000,00		79.200.000,00		95.040.000,00		114.048.000,00		
Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan)	2	2	55.000.000,00	2	66.000.000,00	2	79.200.000,00	2	95.040.000,00	2	114.048.000,00		
2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				326.000.000,00		391.200.000,00		469.440.000,00		563.328.000,00		675.993.600,00		
Terlaksananya Layanan Rujukan Korban Kekerasan bagi Perempuan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan	20	20	326.000.000,00	20	391.200.000,00	2.020	469.440.000,00	20	563.328.000,00	20	675.993.600,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tingkatateng/Kota (Orang)													
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	20	20		20		20		20		20			
2.08.03.2.02.0004 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				55.000.000,00		66.000.000,00		79.200.000,00		95.040.000,00		114.048.000,00		
Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan	20	20	55.000.000,00	20	66.000.000,00	2.020	79.200.000,00	20	95.040.000,00	20	114.048.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Tingkatateng/Kota (Orang)													
2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				66.000.000,00		79.200.000,00		95.040.000,00		114.048.000,00		136.857.600,00		
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	20	20	66.000.000,00	20	79.200.000,00	20	95.040.000,00	20	114.048.000,00	20	136.857.600,00		
2.08.03.2.02.0006 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				55.000.000,00		66.000.000,00		79.200.000,00		95.040.000,00		114.048.000,00		
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	20	20	55.000.000,00	20	66.000.000,00	20	79.200.000,00	20	95.040.000,00	20	114.048.000,00		
2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				75.000.000,00		90.000.000,00		108.000.000,00		129.600.000,00		155.520.000,00		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	20	20	75.000.000,00	20	90.000.000,00	20	108.000.000,00	20	129.600.000,00	20	155.520.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				75.000.000,00		90.000.000,00		108.000.000,00		129.600.000,00		155.520.000,00		
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	1	1	75.000.000,00	1	90.000.000,00	1	108.000.000,00	1	129.600.000,00	1	155.520.000,00		
2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				98.475.000,00		118.170.000,00		141.804.000,00		170.164.000,00		204.197.760,00		
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	40	40	98.475.000,00	50	118.170.000,00	50	141.804.000,00	50	170.164.000,00	60	204.197.760,00		
	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)	1	1		2		2		2		2			
	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat	4	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)													
	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)	40	40		50		50		50		60			
2.08.03.2.03.0005 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000,00		60.000.000,00		72.000.000,00		86.400.000,00		103.680.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	4	4	50.000.000,00	4	60.000.000,00	4	72.000.000,00	4	86.400.000,00	4	103.680.000,00		
2.08.03.2.03.0006 - Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				13.475.000,00		16.170.000,00		19.404.000,00		23.284.000,00		27.941.760,00		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia	1	1	13.475.000,00	1	16.170.000,00	1	19.404.000,00	1	23.284.000,00	1	27.941.760,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi (Laporan)													
2.08.03.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				10.000.000,00		12.000.000,00		14.400.000,00		17.280.000,00		20.736.000,00		
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)	40	40	10.000.000,00	50	12.000.000,00	50	14.400.000,00	50	17.280.000,00	60	20.736.000,00		
2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				10.000.000,00		12.000.000,00		14.400.000,00		17.280.000,00		20.736.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	40	40	10.000.000,00	50	12.000.000,00	50	14.400.000,00	50	17.280.000,00	60	20.736.000,00		
2.08.03.2.03.0009 - Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				15.000.000,00		18.000.000,00		21.600.000,00		25.920.000,00		31.104.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)	1	1	15.000.000,00	2	18.000.000,00	2	21.600.000,00	2	25.920.000,00	2	31.104.000,00		
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				940.485.030,00		1.128.582.036,00		1.354.298.444,00		1.625.158.132,00		1.950.189.758,00		
Meningkatnya Peran Lembaga dalam Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga yang Aktif dalam Peningkatan Kualitas Keluarga (%)	72,36	73,60	940.485.030,00	73,80	1.128.582.036,00	74,25	1.354.298.444,00	74,60	1.625.158.132,00	75,10	1.950.189.758,00	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,00		180.000.000,00		216.000.000,00		259.200.000,00		311.040.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Data Keluarga yang Mendapat Layanan	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan)	1	1	150.000.000,00	1	180.000.000,00	1	216.000.000,00	1	259.200.000,00	1	311.040.000,00		
	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	1	1		1		1		1		1			
	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen)													
2.08.04.2.01.0004 - Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				70.000.000,00		84.000.000,00		100.800.000,00		120.960.000,00		145.152.000,00		
Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	1	1	70.000.000,00	1	84.000.000,00	1	100.800.000,00	1	120.960.000,00	1	145.152.000,00		
2.08.04.2.01.0005 - Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				60.000.000,00		72.000.000,00		86.400.000,00		103.680.000,00		124.416.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan)	1	1	60.000.000,00	1	72.000.000,00	1	86.400.000,00	1	103.680.000,00	1	124.416.000,00		
2.08.04.2.01.0007 - monitoring evaluasi				20.000.000,00		24.000.000,00		28.800.000,00		34.560.000,00		41.472.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	24.000.000,00	1	28.800.000,00	1	34.560.000,00	1	41.472.000,00		
2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				190.000.000,00		228.000.000,00		273.600.000,00		328.320.000,00		393.984.000,00		
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan	1	1	190.000.000,00	1	228.000.000,00	1	273.600.000,00	1	328.320.000,00	1	393.984.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	pendampingan (Lembaga)													
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	33	33		33		33		33		33			
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	33	33		33		33		33		33			
	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	33	33		33		33		33		33			
2.08.04.2.02.0004 - monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				20.000.000,00		24.000.000,00		28.800.000,00		34.560.000,00		41.472.000,00		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan	1	1	20.000.000,00	1	24.000.000,00	1	28.800.000,00	1	34.560.000,00	1	41.472.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)													
2.08.04.2.02.0005 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				20.000.000,00		24.000.000,00		28.800.000,00		34.560.000,00		41.472.000,00		
Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	1	1	20.000.000,00	1	24.000.000,00	1	28.800.000,00	1	34.560.000,00	1	41.472.000,00		
2.08.04.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000,00		60.000.000,00		72.000.000,00		86.400.000,00		103.680.000,00		
Terlaksananya penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	33	33	50.000.000,00	33	60.000.000,00	33	72.000.000,00	33	86.400.000,00	33	103.680.000,00		
2.08.04.2.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000,00		60.000.000,00		72.000.000,00		86.400.000,00		103.680.000,00		
Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan	33	33	50.000.000,00	33	60.000.000,00	33	72.000.000,00	33	86.400.000,00	33	103.680.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	peningkatan kapasitas (Lembaga)													
2.08.04.2.02.0008 - Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000,00		60.000.000,00		72.000.000,00		86.400.000,00		103.680.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	33	33	50.000.000,00	33	60.000.000,00	33	72.000.000,00	33	86.400.000,00	33	103.680.000,00		
2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				600.485.030,00		720.582.036,00		864.698.444,00		1.037.638.132,00		1.245.165.758,00		
Terlaksananya Layanan bagi Calon Keluarga dan Keluarga	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	20	20	600.485.030,00	25	720.582.036,00	30	864.698.444,00	35	1.037.638.132,00	40	1.245.165.758,00		
	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	50	50		50		50		50		50			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	5	5		10		15		20		25			
2.08.04.2.03.0002 - layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota				35.242.515,00		42.291.018,00		50.749.222,00		60.899.066,00		73.078.879,00		
Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	20	20	35.242.515,00	25	42.291.018,00	30	50.749.222,00	35	60.899.066,00	40	73.078.879,00		
2.08.04.2.03.0003 - layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota				35.242.515,00		42.291.018,00		50.749.222,00		60.899.066,00		73.078.879,00		
Terlaksananya layanan rujukan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	5	5	35.242.515,00	10	42.291.018,00	15	50.749.222,00	20	60.899.066,00	25	73.078.879,00		
2.08.04.2.03.0004 - layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota				350.000.000,00		420.000.000,00		504.000.000,00		604.800.000,00		725.760.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	350.000.000,00	50	420.000.000,00	50	504.000.000,00	50	604.800.000,00	50	725.760.000,00		
2.08.04.2.03.0005 - Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota				150.000.000,00		180.000.000,00		216.000.000,00		259.200.000,00		311.040.000,00		
Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	150.000.000,00	50	180.000.000,00	50	216.000.000,00	50	259.200.000,00	50	311.040.000,00		
2.08.04.2.03.0006 - Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota				30.000.000,00		36.000.000,00		43.200.000,00		51.840.000,00		62.208.000,00		
Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	30.000.000,00	50	36.000.000,00	50	43.200.000,00	50	51.840.000,00	50	62.208.000,00		
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				45.000.000,00		57.000.000,00		59.400.000,00		62.280.000,00		65.736.000,00		
Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Persentase Pemanfaatan Data Gender dan Anak oleh PD (%)	100	100	45.000.000,00	100	57.000.000,00	100	59.400.000,00	100	62.280.000,00	100	65.736.000,00	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data				45.000.000,00		57.000.000,00		59.400.000,00		62.280.000,00		65.736.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
Tersusunnya Profil Gender dan Anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	52	52	45.000.000,00	52	57.000.000,00	52	59.400.000,00	52	62.280.000,00	52	65.736.000,00		
	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota				35.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1	35.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00		
2.08.05.2.01.0004 - Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak				10.000.000,00		12.000.000,00		14.400.000,00		17.280.000,00		20.736.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	52	52	10.000.000,00	52	12.000.000,00	52	14.400.000,00	52	17.280.000,00	52	20.736.000,00		
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				1.554.128.139,00		1.864.953.767,00		2.237.944.520,00		2.685.533.424,00		3.222.640.109,00		
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	65,57	65,60	1.554.128.139,00	65,65	1.864.953.767,00	65,70	2.237.944.520,00	65,75	2.685.533.424,00	65,80	3.222.640.109,00	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				1.014.128.139,00		1.216.953.767,00		1.460.344.520,00		1.752.413.424,00		2.102.896.109,00		
Terlaksananya Sosialisasi Sekolah & Puskesmas Ramah Anak Jumlah Sekolah & Puskesmas	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	1	1	1.014.128.139,00	1	1.216.953.767,00	1	1.460.344.520,00	1	1.752.413.424,00	1	2.102.896.109,00		
	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	1	1		1		1		1		1			
	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	75	75		75		75		75		75			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				300.000.000,00		360.000.000,00		432.000.000,00		518.400.000,00		622.080.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	1	1	300.000.000,00	1	360.000.000,00	1	432.000.000,00	1	518.400.000,00	1	622.080.000,00		
2.08.06.2.01.0004 - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				181.628.139,00		217.953.767,00		261.544.520,00		313.853.424,00		376.624.109,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	75	75	181.628.139,00	75	217.953.767,00	75	261.544.520,00	75	313.853.424,00	75	376.624.109,00		
2.08.06.2.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				450.000.000,00		540.000.000,00		648.000.000,00		777.600.000,00		933.120.000,00		
Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	1	1	450.000.000,00	1	540.000.000,00	1	648.000.000,00	1	777.600.000,00	1	933.120.000,00		
2.08.06.2.01.0006 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				82.500.000,00		99.000.000,00		118.800.000,00		142.560.000,00		171.072.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2	2	82.500.000,00	2	99.000.000,00	2	118.800.000,00	2	142.560.000,00	2	171.072.000,00		
2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				540.000.000,00		648.000.000,00		777.600.000,00		933.120.000,00		1.119.744.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Lembaga Perlindungan	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	5	5	540.000.000,00	5	648.000.000,00	5	777.600.000,00	5	933.120.000,00	5	1.119.744.000,00		
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kabupaten/Kota (Dokumen)													
	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	5	5		5		5		5		5			
	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2	2		2		2		2		2			
2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				100.000.000,00		120.000.000,00		144.000.000,00		172.800.000,00		207.360.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2	2	100.000.000,00	2	120.000.000,00	2	144.000.000,00	2	172.800.000,00	2	207.360.000,00		
2.08.06.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				165.000.000,00		198.000.000,00		237.600.000,00		285.120.000,00		342.144.000,00		
Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas	1	1	165.000.000,00	1	198.000.000,00	1	237.600.000,00	1	285.120.000,00	1	342.144.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)													
2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				110.000.000,00		132.000.000,00		158.400.000,00		190.080.000,00		228.096.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	5	5	110.000.000,00	5	132.000.000,00	5	158.400.000,00	5	190.080.000,00	5	228.096.000,00		
2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				82.500.000,00		99.000.000,00		118.800.000,00		142.560.000,00		171.072.000,00		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	5	5	82.500.000,00	5	99.000.000,00	5	118.800.000,00	5	142.560.000,00	5	171.072.000,00		
2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan				82.500.000,00		99.000.000,00		118.800.000,00		142.560.000,00		171.072.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	5	5	82.500.000,00	5	99.000.000,00	5	118.800.000,00	5	142.560.000,00	5	171.072.000,00		
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				1.577.200.000,00		1.892.640.000,00		2.271.168.000,00		2.725.401.600,00		3.270.481.920,00		
Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	85,32	85,40	1.577.200.000,00	85,45	1.892.640.000,00	85,50	2.271.168.000,00	85,55	2.725.401.600,00	85,60	3.270.481.920,00	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				380.700.000,00		456.840.000,00		548.208.000,00		657.849.600,00		789.419.520,00		
Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	2	2	380.700.000,00	2	456.840.000,00	2	548.208.000,00	2	657.849.600,00	2	789.419.520,00		
	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	30	30		35		40		45		50			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan)	1	1		1		1		1		1			
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	15	15		15		15		15		15			
2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				189.200.000,00		227.040.000,00		272.448.000,00		326.937.600,00		392.325.120,00		
terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	15	15	189.200.000,00	15	227.040.000,00	15	272.448.000,00	15	326.937.600,00	15	392.325.120,00		
2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan				100.000.000,00		120.000.000,00		144.000.000,00		172.800.000,00		207.360.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kewenangan Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	2	2	100.000.000,00	2	120.000.000,00	2	144.000.000,00	2	172.800.000,00	2	207.360.000,00		
2.08.07.2.01.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota				55.000.000,00		66.000.000,00		79.200.000,00		95.040.000,00		114.048.000,00		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Laporan)	2	2	55.000.000,00	2	66.000.000,00	2	79.200.000,00	2	95.040.000,00	2	114.048.000,00		
2.08.07.2.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota				16.500.000,00		19.800.000,00		23.760.000,00		28.512.000,00		34.214.400,00		
Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	2	2	16.500.000,00	2	19.800.000,00	2	23.760.000,00	2	28.512.000,00	2	34.214.400,00		
2.08.07.2.01.0010 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota				10.000.000,00		12.000.000,00		14.400.000,00		17.280.000,00		20.736.000,00		
Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	30	30	10.000.000,00	35	12.000.000,00	40	14.400.000,00	45	17.280.000,00	50	20.736.000,00		
2.08.07.2.01.0011 - Penyusunan kebijakan				10.000.000,00		12.000.000,00		14.400.000,00		17.280.000,00		20.736.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota														
Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan)	1	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	14.400.000,00	1	17.280.000,00	1	20.736.000,00		
2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				441.000.000,00		529.200.000,00		635.040.000,00		762.048.000,00		914.457.600,00		
Terlaksananya Layanan dan Pendampingan Korban Kekerasan terhadap Anak	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	40	40	441.000.000,00	40	529.200.000,00	40	635.040.000,00	40	762.048.000,00	40	914.457.600,00		
	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat	59	40		40		40		40		40			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kabupaten/Kota (Orang)													
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	30	30		30		30		30		30			
2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				50.000.000,00		60.000.000,00		72.000.000,00		86.400.000,00		103.680.000,00		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	59	40	50.000.000,00	40	60.000.000,00	40	72.000.000,00	40	86.400.000,00	40	103.680.000,00		
2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				137.500.000,00		165.000.000,00		198.000.000,00		237.600.000,00		285.120.000,00		
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	30	30	137.500.000,00	30	165.000.000,00	30	198.000.000,00	30	237.600.000,00	30	285.120.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.07.2.02.0011 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				82.500.000,00		99.000.000,00		118.800.000,00		142.560.000,00		171.072.000,00		
layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	30	30	82.500.000,00	30	99.000.000,00	30	118.800.000,00	30	142.560.000,00	30	171.072.000,00		
2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				66.000.000,00		79.200.000,00		95.040.000,00		114.048.000,00		136.857.600,00		
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	30	30	66.000.000,00	30	79.200.000,00	30	95.040.000,00	30	114.048.000,00	30	136.857.600,00		
2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				50.000.000,00		60.000.000,00		72.000.000,00		86.400.000,00		103.680.000,00		
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	40	40	50.000.000,00	40	60.000.000,00	40	72.000.000,00	40	86.400.000,00	40	103.680.000,00		
2.08.07.2.02.0015 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban				55.000.000,00		66.000.000,00		79.200.000,00		95.040.000,00		114.048.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	30	30	55.000.000,00	30	66.000.000,00	30	79.200.000,00	30	95.040.000,00	30	114.048.000,00		
2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				755.500.000,00		906.600.000,00		1.087.920.000,00		1.305.504.000,00		1.566.604.800,00		
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	35	35	755.500.000,00	35	906.600.000,00	35	1.087.920.000,00	35	1.305.504.000,00	35	1.566.604.800,00		
	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)													
	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	68	125		125		125		125		125			
	jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2	2		2		2		2		2			
2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat				55.000.000,00		66.000.000,00		79.200.000,00		95.040.000,00		114.048.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
daerah kabupaten/kota														
Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	1	1	55.000.000,00	1	66.000.000,00	1	79.200.000,00	1	95.040.000,00	1	114.048.000,00		
2.08.07.2.03.0009 - koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota				55.000.000,00		66.000.000,00		79.200.000,00		95.040.000,00		114.048.000,00		
terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1	1	55.000.000,00	1	66.000.000,00	1	79.200.000,00	1	95.040.000,00	1	114.048.000,00		
2.08.07.2.03.0010 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				55.000.000,00		66.000.000,00		79.200.000,00		95.040.000,00		114.048.000,00		
terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi	1	1	55.000.000,00	1	66.000.000,00	1	79.200.000,00	1	95.040.000,00	1	114.048.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)													
2.08.07.2.03.0011 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				450.000.000,00		540.000.000,00		648.000.000,00		777.600.000,00		933.120.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	68	125	450.000.000,00	125	540.000.000,00	125	648.000.000,00	125	777.600.000,00	125	933.120.000,00		
2.08.07.2.03.0012 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000,00		30.000.000,00		36.000.000,00		43.200.000,00		51.840.000,00		
terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	1	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	36.000.000,00	1	43.200.000,00	1	51.840.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota (Dokumen)													
2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai				38.500.000,00		46.200.000,00		55.440.000,00		66.528.000,00		79.833.600,00		
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	35	35	38.500.000,00	35	46.200.000,00	35	55.440.000,00	35	66.528.000,00	35	79.833.600,00		
2.08.07.2.03.0014 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				77.000.000,00		92.400.000,00		110.880.000,00		133.056.000,00		159.667.200,00		
terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2	2	77.000.000,00	2	92.400.000,00	2	110.880.000,00	2	133.056.000,00	2	159.667.200,00		

4.2 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.4 Daftar SubKegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1.	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya Peran TKSK dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.02.2.03.0010 - Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.02.2.03.0011 - Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.02.2.03.0015 - Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
2.	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.04.2.02.0001 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.04.2.02.0002 - Pemberian Layanan Kedaruratan	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.04.2.02.0003 - Penyediaan Permakanan	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.04.2.02.0004 - Penyediaan Sandang	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.04.2.02.0005 - Penyediaan Alat Bantu	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.04.2.02.0006 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.04.2.02.0008 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.04.2.02.0009 - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.04.2.02.0010 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.04.2.02.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.04.2.02.0012 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.04.2.02.0013 - Pemberian Layanan Rujukan	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.04.2.02.0015 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS)	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.04.2.02.0016 - Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
3.	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.05.2.01.0002 - Rujukan Anak-Anak Terlantar	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.05.2.01.0003 - Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.05.2.01.0004 - Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.05.2.02.0009 - Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
4.	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.06.2.02.0003 - Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.06.2.02.0005 - Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.06.2.02.0006 - Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.06.2.02.0007 - Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.06.2.02.0008 - Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.06.2.02.0011 - Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
5.	1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya Pengelolaan TMP	1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.07.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
			1.06.07.2.01.0005 - Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
6.	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya Peran Organisasi Kemasyarakatan	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.02.2.02.0005 - Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			2.08.02.2.02.0006 - Pendampinganlembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.02.2.02.0007 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
7.	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.03.2.01.0003 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.03.2.01.0004 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.03.2.01.0007 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.03.2.02.0004 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.03.2.02.0006 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
				anak dan responsif gender
			2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.03.2.03.0005 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.03.2.03.0006 - Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.03.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.03.2.03.0009 - Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
8.	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya Peran Lembaga dalam Peningkatan Kualitas Keluarga	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.04.2.01.0004 - Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.04.2.01.0005 - Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.04.2.01.0007 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.04.2.02.0004 - monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.04.2.02.0005 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.04.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			2.08.04.2.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.04.2.02.0008 - Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.04.2.03.0002 - layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.04.2.03.0003 - layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.04.2.03.0004 - layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.04.2.03.0005 - Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.04.2.03.0006 - Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
9.	2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.05.2.01.0004 - Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
10.	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.06.2.01.0004 - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.06.2.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan	Mewujudkan Kabupaten

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.06.2.01.0006 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.06.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
11.	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.07.2.01.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.07.2.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.07.2.01.0010 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			2.08.07.2.01.0011 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.07.2.02.0011 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.07.2.02.0015 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.07.2.03.0009 - koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.07.2.03.0010 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.07.2.03.0011 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.07.2.03.0012 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
			2.08.07.2.03.0014 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Nganjuk

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
2.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	62,61	62,67	62,73	62,79	62,85	62,91	62,97	
3.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,18	94,28	94,38	94,5	94,6	94,7	94,8	
4.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	70,31	70,35	70,35	70,38	70,38	70,4	70,4	

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa apa yang terdapat pada dokumen perencanaan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk merupakan hasil reviu dari hasil-hasil strategis terkait dengan urusan social dan urusan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Indikator Kinerja Utama (IKU) akan diperjanjikan sebagai Perjanjian Kinerja Kepala Dinas yang nantinya akan diukur setiap triwulan dan akan menjadi hasil ukur pada laporan dokumen LKJIP, LKPJ, LPPD setiap tahunnya. Harapannya indicator dan target pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk mengampu dua urusan, yaitu Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Perempuan. Berdasarkan tabel dapat dijabarkan bahwa untuk urusan Sosial berfokus pada Kesejahteraan Sosial. Sedangkan Urusan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berfokus pada upaya pembangunan gender dan perlindungan terhadap anak.

Berikut penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Indeks Kesejahteraan Sosial

   IKESOS merupakan ukuran kesejahteraan social. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Indikator tersebut merupakan indikator baru dan diperoleh berdasarkan penghitungan oleh Kementerian Sosial.

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

   Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks yang mengukur tingkat kesetaraan gender dalam pembangunan. Dimensi pada indeks pembangunan gender yaitu, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Indikator tersebut merupakan indikator lama pada Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang masih tetap tercantum pada Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029. Data indicator tersebut diperoleh berdasarkan penghitungan oleh BPS Kabupaten Nganjuk

3. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

   Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah Indikator yang menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak. IPA disusun berdasarkan 5 klaster hak anak, yaitu: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan perlindungan khusus. Indikator tersebut merupakan indikator baru dan diperoleh berdasarkan penghitungan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa Indikator kinerja difungsikan sebagai alat ukur yang menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati bersama. Adapun indikator Bidang Sosial pada Urusan Sosial dan indicator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adapun Indikator kinerja yang mengacu pada sasaran dan tujuan dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
2.	Persentase Jumlah PSKS yang Aktif	positif	%	74,69	74,85	75,24	76,43	77,02	77,69	78	
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
8.	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
9.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
10.	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	positif	%	28,3141	28,5	28,5	29	29,4	29,7	30	
11.	Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
12.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	negatif	per 100.000 penduduk	6,9803	6,87	6,76	6,65	6,54	6,43	6,32	

Berikut penjelasan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut :

1. Persentase Jumlah PSKS yang Aktif

   Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau Masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan social. Indikator tersebut merupakan indicator lama pada Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang masih tetap tercantum pada Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029. Hal ini dikarenakan PSKS merupakan tenaga social yang mempunyai tugas untuk menangani masalah social di mana PSKS dapat diukur melalui keaktifan dalam menjalankan perannya. Data indicator tersebut diperoleh berdasarkan penghitungan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti

   Merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial dengan indicator Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti. Data diperoleh berdasarkan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaporkan setiap Triwulan pada Web Bangda yaitu web pelaporan spm sesuai bidang urusan pelayanan.

3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti

   Merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial dengan indicator Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti. Data diperoleh berdasarkan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaporkan setiap Triwulan pada Web Bangda yaitu web pelaporan spm sesuai bidang urusan pelayanan.

4. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti

   Merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial dengan indicator Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti. Data diperoleh berdasarkan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaporkan setiap Triwulan pada Web Bangda yaitu web pelaporan spm sesuai bidang urusan pelayanan.

5. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti

   Merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial dengan indicator Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti. Data diperoleh berdasarkan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaporkan setiap Triwulan pada Web Bangda yaitu web pelaporan spm sesuai bidang urusan pelayanan.

6. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

   Merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial dengan indicator Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota. Data diperoleh berdasarkan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaporkan setiap Triwulan pada Web Bangda yaitu web pelaporan spm sesuai bidang urusan pelayanan.

7. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten

   Anak korban kekerasan adalah anak yang mengalami penganiayaan fisik, seksual, emosional, atau penelantaran, yang dapat menyebabkan dampak jangka panjang pada kesehatan fisik dan mentalnya, seperti kesulitan mengendalikan emosi, gangguan fungsi otak, dan masalah hubungan sosial. Indikator tersebut merupakan indicator lama pada Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang masih tetap tercantum pada Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029. Tetapi bedanya indicator ini berfokus pada kekerasan anak yang ditangani oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Data indicator tersebut diperoleh berdasarkan penghitungan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

8. Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD

   Angka responsif gender adalah metrik atau indikator yang mengukur sejauh mana anggaran atau program suatu pemerintah atau organisasi mempertimbangkan kebutuhan dan peran perempuan dan laki-laki untuk mencapai kesetaraan gender. Indikator tersebut merupakan outcome Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang setiap tahunnya dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sebagai Koordinator Pelaksana Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Nganjuk. Data ARG diperoleh dari *crosscutting* dengan Badan dan Perangkat Daerah lain sebagai Tim Driver Pengarusutamaan Gender

9. Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender

   Lembaga Pemerintah adalah Organisasi pemerintah yang ada di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Indikator tersebut mengukur Lembaga Pemerintah di Kabupaten nganjuk yang telah melaksanakan Pengarusutamaan Gender dengan adanya laporan GAP, GBS, dan TOR yang dibuat oleh masing-masing Lembaga Pemerintah. Data tersebut diperoleh di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk.

10. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan)

    Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu kejahatan serius yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi. Bentuk eksploitasi ini bisa berupa perbudakan modern, kerja paksa, eksploitasi seksual, atau perdagangan organ tubuh.

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 agar dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis manajemen risiko pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001